

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA DAN NEGERI DI UPTD
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V
KAB. ACEH TAMIANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd)

Oleh

SURIA BAKTI
Npm : 1720060008



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **SURIA BAKTI**
NPM : 1720060008
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA DAN NEGERI DI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V KAB. ACEH TAMIANG.**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Sidang Tesis

Medan, 09 Juli 2019

Komisi Pembimbing

UMSU
Pembimbing I Pembimbing II

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Dr. SRI NURABDIAH PRATIWI, M.Pd


Dr. AMINI, M.Pd

PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DALAM PEMBIAYAAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SWASTA DAN NEGERI DI UPTD PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN V KAB. ACEH TAMIANG**



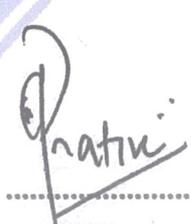
SURIA BAKTI
NPM : 1720060008

Konsentrasi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan LULUS dalam ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd) pada hari Selasa, Tanggal 09 Juli 2019”

Panitia Penguji

1. **Dr. SRI NURABDIAH PRATIWI, M.Pd**
Ketua

1. 

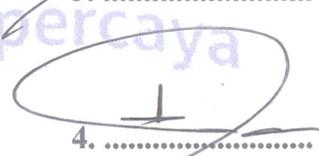
2. **Dr. AMINI, M.Pd**
Sekretaris

2. 

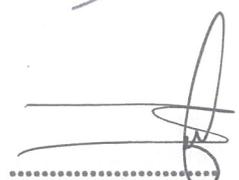
3. **Dr. SULHATI, MA**
Anggota

3. 

4. **Dr. MARDIYANTO, M.Pd**
Anggota

4. 

5. **Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**
Anggota

5. 

PERTANYAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma dan etika penulisannya.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Juni 2019



(Suria Bakti)

ABSTRACT

Bakti, Suria. Effectiveness of Utilizing School Operational Assistance in Financing the Quality of Education for Private and Public Elementary Schools in the UPTD of Education and Culture V Kab. Aceh Tamiang, Tesis 2019.

This study aims to determine the effectiveness of the utilization of School Operational Assistance (BOS) in financing education quality related to the 8 standards at Lung Manyo Public Elementary School. To determine the effectiveness of the utilization of School Operational Assistance (BOS) in financing education quality related to the 8 standards in Private Lembah Jaya Elementary Schools.

The method used in this study is descriptive with qualitative and quantitative approaches. In this study the data source was obtained from the Head of SD Negeri Lung Manyo, head of the Private Elementary School Lembah Jaya, Deputy Principal, Treasurer and employees. The techniques and procedures for collecting data in this study are observation, interviews, and documentation.

The results showed that the utilization of the School Operational Assistance (BOS) in Lung Manyo Elementary School was effective in financing education quality, this was in accordance with the funding program carried out by the school namely the development of graduate competencies, development of content standards, development of learning processes, development of students and education, development of facilities and infrastructure, development and implementation of school management, development and excavation of educational funding sources and library development. All of the financing programs were well realized and no BOS funds were left. The utilization of School Operational Assistance (BOS) in Lembah Jaya Private Elementary Schools was effective in financing the quality of education, this was also in accordance with the funding program carried out by the school namely the development of graduate competencies, development of content standards, development of learning processes, development of students and education, development of facilities and infrastructure, development and implementation of school management, development and excavation of educational funding sources and library development. The results showed that the utilization of School Operational Assistance (BOS) at Lung Public Elementary School Manyo are effective in financing the quality of education, this is in accordance with the financing programs carried out by the school namely the development of graduate competencies, development of content standards, development of learning processes, development of students and education, development of facilities and infrastructure a, development and implementation of school management, development and excavation of educational funding sources and library development. All of these financing programs were well realized and there were no BOS funds left. Constraints and barriers to the utilization of School Operational Assistance (BOS) in financing the quality of education at Lung Manyo Elementary School and Private Lembah Jaya Elementary School, namely the disbursement of BOS funds in the first stage was always late even though RKAS has been submitted.

Keywords: Effectiveness, Utilization of BOS, Quality of Education

ABSTRAK

Bakti, Suria. Efektivitas Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pembiayaan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Swasta dan Negeri di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang, Tesis, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standar di SD Negeri Lung Manyo. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standar di SD Swasta Lembah Jaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari Kepala SD Negeri Lung Manyo, kepala SD Lembah Jaya, Wakil Kepala sekolah, Bendahara dan pegawai. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Lung Manyo efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, hal ini sesuai dengan program pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan peserta didik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan pengembangan perpustakaan. Seluruh program pembiayaan tersebut terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Swasta Lembah Jaya efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, hal ini juga sesuai dengan program pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan peserta didik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan pengembangan perpustakaan. Seluruh program pembiayaan tersebut terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Kendala dan hambatan pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya, yaitu pencairan dana BOS pada tahap pertama selalu terlambat walaupun RKAS sudah diajukan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendayagunaan BOS, Mutu Pendidikan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORETIK.....	11
A. Pembiayaan Pendidikan	11
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	11
2. Fungsi Pembiayaan Pendidikan	12
3. Manfaat Pembiayaan Pendidikan.....	12
4. Tujuan Pembiayaan Pendidikan.....	14
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan	14
6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan	

Pendidikan.....	16
7. Model Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan	17
8. Indikator Pembiayaan Pendidikan.....	17
9. Asas-Asas Pembiayaan Pendidikan	18
B.Pengertian Efektivitas.....	19
C.Biaya Satuan Pendidikan	20
1. Pengertian Biaya Satuan Pendidikan	20
2. Klasifikasi Biaya Satuan Pendidikan	21
D.Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	24
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	24
2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26
3. Sasaran Dana BOS	26
4. Efektifitas Pengelolaan Dana BOS	27
5. Satuan Biaya.....	29
6. Manfaat Dana BOS dalam Penyelenggaraan Pendidikan .	29
E.Mutu Pendidikan	31
1. Pengertian Mutu Pendidikan	31
2. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan	38
3. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan	40
F.Hasil Penelitian yang Relevan	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
1. Tempat Penelitian.....	44

2. Waktu Penelitian	44
B. Latar Penelitian	45
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	45
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	48
F. Prosedur Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	54
1. Sejarah Singkat SD Negeri Lung Manyo Kec. Manyak Payed.....	54
a. Visi	55
b. Misi	55
c. Tujuan	55
d. Struktur Organisasi	56
e. Sarana Prasarana SD Negeri Lung Manyo.....	56
2. Sejarah Singkat SD Swasta Lembah Jaya Kec. Manyak Payed.....	57
a. Visi	58
b. Misi	58
c. Tujuan	59
d. Struktur Organisasi	60
e. Sarana Prasarana SD Swasta Lembah Jaya.....	60
B. Temuan Penelitian.....	61
1. Efektivitas Pendayagunaan BOS dalam Pembiayaan Mutu	

Pendidikan Terkait 8 Standar di SD Negeri Lung Manyo	61
a. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan.....	61
b. Efektivitas Pengembangan Standar Isi.....	64
c. Efektivitas Pengembangan Standar Proses	65
d. Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	69
e. Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	72
f. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan	76
g. Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan	77
h. Efektivitas Pengembangan Perpustakaan.....	80
2. Efektivitas Pendayagunaan BOS dalam Pembiayaan Mutu Pendidikan Terkait 8 Standar di SD Swasta Lembah Jaya	91
a. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan.....	92
b. Efektivitas Pengembangan Standar Isi.....	94
c. Efektivitas Pengembangan Standar Proses	95
d. Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98
e. Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	99
f. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan	100
g. Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan	101
h. Efektivitas Pengembangan Perpustakaan.....	104
C. Pembahasan.....	115

1. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan.....	118
2. Efektivitas Pengembangan Standar Isi.....	119
3. Efektivitas Pengembangan Standar Proses	120
4. Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120
5. Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	121
6. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan	121
7. Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan	122
8. Efektivitas Pengembangan Perpustakaan.....	124
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA	135
Biodata Penulis	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, serta menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang akan mengantarkannya menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Berbicara tentang mutu pendidikan maka mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bank Dunia (*World Bank*) menyebut bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan. Indonesia sendiri telah mencanangkan program reformasi pendidikan untuk membenahi kualitas sektor ini selama 15 tahun sejak 2002. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang

masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah kasus buta huruf, 55 persen anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam (www.cnnindonesia.com).

Sementara dari sisi akses pendidikan, jumlah siswa yang kini mampu bersekolah meningkat cukup signifikan. Adapun peningkatan akses ini dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan, peningkatan partisipasi para pelaku lokal dalam tata kelola pendidikan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas guru, hingga memastikan kesiapan siswa. Sayangnya, hasil tersebut belum bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Bank Dunia melihat masih ada sejumlah tantangan yang masih belum terselesaikan, misalnya tidak meratanya akses pendidikan itu alias masih ada ketimpangan.. Dari sini, Bank Dunia melihat perlu ada perluasan akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan standar pendidikan internasional, baik secara kurikulum maupun praktik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kriteria kualifikasi guru hingga meluncurkan kampanye perbaikan kualitas pendidikan. Sedangkan dari sisi pengaturan anggaran pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan anggaran berdasarkan kinerja dan kualitas pendidikan yang bisa dibangun daerah (www.cnnindonesia.com).

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan memang kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Padahal, dari sisi anggaran, dana untuk pendidikan telah mencapai Rp.444 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 (www.cnnindonesia.com).

Selain anggaran, ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, diantaranya kebijakan sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, anggaran pendidikan, pendidik dan tenaga pendidik dan lain-lain. Penyebab mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan adalah: (1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini menggunakan pendekatan *education production function*, yang hanya memusatkan pada masukan (*input*)-keluaran (*output*), kurang memperhatikan proses. Lembaga pendidikan sekolah berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua masukan yang diperlukan dalam kegiatan produksi, maka akan menghasilkan output yang dikehendaki, sementara proses pendidikan yang sangat menentukan keluaran kurang mendapat perhatian, (2) penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini dilakukan secara birokrasi-sentralistik. Sekolah lebih sebagai sub ordinasi dari birokrasi di atasnya, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas atau inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, dan (3) peran serta warga sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua murid dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih sangat kecil. Partisipasi masyarakat pada umumnya masih lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan.

Berkaitan dengan anggaran pembiayaan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka program pendidikan menengah universal (PMU) meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

menengah di seluruh Indonesia (Kemendikbud, 2013). Program BOS merupakan program nasional dibidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Salah satu Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta yang ada di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang yaitu SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Pada Tahun Anggaran 2018 SD Negeri Lung Manyo telah mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 106.400.000, yang digunakan untuk berbagai macam pembiayaan pendidikan, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung, belanja modal jalan, irigasi dan belanja modal aset tetap. Penghitungan biaya pendidikan yang tepat, efisien dan efektif sangat diperlukan bagi sekolah dalam menetapkan biaya

penyelenggaraan pendidikan. Sebelum sekolah tersebut menerima dana BOS, sarana dan prasarana di kedua sekolah tersebut masih kurang, masih ada ruang kelas yang kurang memadai, masih ada atap kelas yang bocor, kursi dan meja yang patah, perpustakaan yang kurang nyaman, WC yang kurang sehat. Namun setelah kedua sekolah tersebut menerima dana BOS, perbaikan dari segi sarana mulai kelihatan, karena dalam penggunaan BOS sudah dianggarkan untuk perbaikan dan perawatan sekolah seperti pengecatan kelas, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mobiler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi proses pembelajaran yang nyaman di sekolah tersebut.

Dengan adanya program dana BOS, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta yang ada di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya dana BOS yaitu membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Selanjutnya, dengan adanya dana BOS khususnya di sekolah swasta, 50% dari jumlah dana BOS bisa digunakan untuk pembayaran gaji guru

honorer. Hal ini menunjukkan bahwa ada manfaat yang begitu besar dengan hadirnya dana BOS bagi setiap sekolah.

Uraian di atas didukung oleh Permendikbud No. 1 Tahun 2018, komponen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah antara lain: 1) pengembangan perpustakaan, 2) penerimaan peserta didik baru, 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 4) kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, 5) pengelolaan sekolah, 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, 7) langganan daya dan jasa, 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9) pembayaran honor dan 10) pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran. Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya dan masih terdapat kelebihan BOS, maka BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai antara lain pembangunan jamban/WC beserta sanitasinya dan/atau kantin sehat, hanya bagi sekolah yang belum memiliki prasarana tersebut.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pembiayaan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Swasta dan Negeri di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini terfokus pada efektivitas pendayagunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan. Sub fokus pendayagunaan dana BOS dalam penelitian ini adalah 1) pengembangan kompetensi lulusan, 2) pengembangan standar isi, 3) pengembangan standar proses, 4) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 5) pengembangan sarana dan prasarana, 6) pengembangan standar pengelolaan, 7) pengembangan standar pembiayaan dan 8) pengembangan perpustakaan. Sedangkan sub fokus mutu pendidikan dalam penelitian ini yaitu 1) input, 2) proses dan 3) output.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standardi SD Negeri Lung Manyo?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standardi SD Swasta Lembah Jaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standardi SD Negeri Lung Manyo.

2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan terkait dengan 8 standardi SD Swasta Lembah Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi berupa bacaan ilmiah.
 - b. Bagi pengembang khazanah ilmu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penggunaan dana BOS yang telah diteliti.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan berkaitan dalam program sekolah, pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana BOS, menjadi gambaran pertimbangan untuk melihat program sekolah yang kurang relevan, serta program sekolah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.
 - b. Bagi Tim BOS, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan alokasi penggunaan dana BOS yang ideal, sehingga kedepannya lebih baik.
 - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas serta transparansi mengenai pengelolaan dana BOS yang

ada di sekolah, sehingga masyarakat atau wali murid dapat melihat dengan jelas pemanfaatan dana dari pemerintah dengan bukti nyata program yang sudah dijalankan sekolah.

- d. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Menurut Fattah (2012: 6) pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah diberbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Daljono (2011:13), biaya pendidikan dilihat dari sisi ekonomi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan/manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.

Lebih lanjut, menurut Supriadi (2010: 4) biaya pendidikan adalah biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau yang dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudiandigunakan untuk membiayai pendidikan. Anggaran sendiri terdiri dari dua sisi, pengeluaran dan penerimaan. Sisi penerimaan meliputi besarnya dana yang diterima dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran berisi alokasi besarnya biaya pendidikan yang harus dibiayai.

Pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (Mulyono, 2010:72).

2. Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurut Mulyono (2010: 79) fungsi pembiayaan pendidikan disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Lebih lanjut, Rohiat (2010: 25) mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu dapat juga dijadikan alat mempengaruhi atau memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga. Apabila dilihat dari perkembangannya biaya memiliki fungsi yaitu : sebagai alat penaksir, sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, sebagai alat efisiensi.

3. Manfaat Pembiayaan Pendidikan

Menurut Rohiat (2010: 27) manfaat pembiayaan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu tujuan manajemen keuangan lembaga pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan,
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan.

Adapun menurut Usman (2013: 8) manfaat pembiayaan pendidikan antara lain:

- a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
- b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer).
- d. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- e. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan).
- f. Teratasinya masalah mutu pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat pembiayaan yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)

4. Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Usman (2013: 9) menjelaskan bahwa tujuan pembiayaan pendidikan yaitu: (1) terlaksananya fungsi manajemen, (2) terselenggaranya pendidikan dengan lancar; (3) terlaksananya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Lebih lanjut Rohiat (2010: 29) menjelaskan bahwa manfaat pembiayaan pendidikan yaitu: (1) memenuhi kebutuhan sekolah; (2) memenuhi standar pendidikan; (3) meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa.

5. Prinsip-prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pendayagunaan pembiayaan pendidikan di sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini merupakan uraian masing-masing prinsip tersebut (Husni, 2015: 278-279).

a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Pada lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya yang jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat di perlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua,

masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dengan cara ditempel di papan pengumuman, ruang guru atau depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat di lakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) partisipasi untuk

saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Pembiayaan pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

6. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan Pendidikan

Menurut Supriadi (2010: 7) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan dibagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Faktor eksternal terdiri dari

- 1) berkembangnya demokrasi pendidikan
- 2) kebijaksanaan pemerintah
- 3) tuntutan akan pendidikan
- 4) adanya inflasi.

b. Faktor internal terdiri dari

- 1) tujuan pendidikan
- 2) pendekatan yang digunakan
- 3) materi yang disajikan
- 4) tingkat dan jenis pendidikan

7. Model Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

Menurut Fattah (2012: 27) pendekatan mikromenganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*totalcost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya perkomponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan.

8. Indikator Pembiayaan Pendidikan

Menurut Mardiasmo (2009:133) indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik dengan pelayanan masyarakat. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan bersama-sama. Karena di satu pihak pelaksanaannya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan dipihak lain sebuah program dapat

dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program dikatakan *cost efficiency* apabila suatu program efektif dan efisien.

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya dapat melebihi apa yang telah dianggarkan, dapat jadi dua kali lipat ataupun tiga kali lipat dari besaran yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. (Mardiasmo, 2009:134). Kegiatan yang telah mencapai tujuan, tujuan tersebut adalah efektif atau tidaknya sekolah dalam mengelola biaya operasional dari pemerintah.

9. Asas-asas Pembiayaan Pendidikan

Arikunto (2010: 189) menyebutkan tiga asas dalam kegiatan pembiayaan pendidikan yaitu:

- a. Asas *plafond*, artinya bahwa anggaran belanja yang dapat diminta tidak dapat melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan.
- b. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelajaran harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan.

- c. Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak dapat secara langsung digunakan untuk suatu keperluan pengeluaran

B. Pengertian Efektivitas

Menurut Wehrich dan Koontz 2005:11 dalam Jejen Musfah hal:7
Effectiveness is the achievement of objectives; efficiency is the achievement of the ends with the least amount of resources.

Efektifitas sekolah mencapai visi sangat terkait banyak variable yaitu : pimpinan, sarana dan prasarana, guru, staf, biaya, pengelolaan, dan siswa. Sekolah sering tidak efektif karena ada satu, dua, atau lebih variable yang tidak berfungsi dengan baik. Mobil, tidak ada bensin atau bannya kempes, tidak berfungsi.

Berdasarkan arti kata diatas dapat disimpulkan **pengertian efektif** adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari sejumlah alternatif, membuat keputusan yang tepat dan berhasil dalam mengimplementasikannya. Dalam manajemen pengertiannya hampir sama tapi lebih singkat yaitu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana sebelumnya yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan efektifitas, efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan. Misalkan saja suatu pekerjaan bisa selesai dengan menggunakan pilihan cara yang sudah ditetapkan, maka cara tersebut sudah efektif. Setiap pekerjaan bila berhasil maka manajemennya sudah dapat dikatakan efektif dalam pertanggung jawaban terhadap unsur pekerjaan tersebut.

C. Biaya Satuan Pendidikan

1. Pengertian Biaya Satuan Pendidikan

Fattah (2012:24) menyatakan bahwa dalam konsep pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan target biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya pendidikan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan ke satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran.

Biaya pendidikan bagi setiap siswa hanya dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang benar-benar digunakan bagi kebutuhan sekolah, guru bakti, siswa dan kepada seluruh kegiatan-kegiatan sekolah dan perbaikan sarana prasarana juga untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan menuju sekolah standar pendidikan nasional.

2. Klasifikasi Biaya Satuan Pendidikan

Pada Panduan Fasilitasi Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Penyusunan Kebijakan (2011: 9) disebutkan bahwa biaya satuan pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Biaya Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenis Input

Biaya satuan pendidikan berdasarkan jenis input dapat diklasifikasikan ke dalam biaya operasional dan biaya investasi.

- 1) Biaya operasional adalah biaya pendidikan yang habis dipakai dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan berulang-ulang setiap tahunnya. Biaya operasional mencakup pengeluaran untuk: gaji dan tunjangan, buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa, biaya pelayanan kesejahteraan (kantin, transport, penginapan dan olahraga) pemeliharaan gedung dan peralatan, langganan *bandwith* (internet) serta biaya langganan daya/jasa seperti listrik, telepon, dan air tanah.
- 2) Biaya investasi adalah biaya pendidikan yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Biaya investasi ini meliputi: pembelian tanah, pembangunan gedung perkantoran, pembangunan gedung layanan pendidikan, pembangunan gedung laboratorium, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan peralatan pembelajaran, pengadaan buku perpustakaan, pengembangan sumber daya manusia, perlengkapan pelajaran lain yang tahan lama,

pembangunan asrama, pengadaan lahan pendidikan, dan sebagainya.

b. Biaya Satuan Pendidikan Berdasarkan Sifat Penggunaan

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan antara biaya langsung (*direct costs*) dan biaya pendidikan tidak langsung (*indirect costs*).

- 1) Biaya langsung (*direct costs*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan input yang langsung terkait dengan proses belajar mengajar. Biaya satuan pendidikan langsung ini mencakup pengeluaran-pengeluaran antara lain untuk gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya; pembelian bahan, peralatan dan perlengkapan belajar; dan pembangunan gedung untuk belajar.
- 2) Biaya tidak langsung (*indirect costs*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar tetapi menunjang proses belajar mengajar tersebut. Biaya tidak langsung ini, antara lain adalah biaya *overhead* lembaga, pemerintah pusat, dan pendapatan yang tidak jadi diterima oleh mahasiswa karena kuliah dan tidak bekerja (*forgone earning*).

c. Biaya Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Menurut jenis penggunaannya khususnya biaya operasional dapat dikelompokkan ke dalam biaya operasional personel dan biaya operasional bukan personel.

- 1) Biaya operasional personel adalah biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengembangan personel. Personel dimaksud

meliputi dosen dan tenaga kependidikan (laboran, pustakawan, tenaga administrasi), administratur meliputi pimpinan lembaga, unit pelaksana teknis, dan lain-lain.

- 2) Biaya operasional bukan personel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran, seperti buku, alat tulis, pemeliharaan gedung, daya dan jasa, dan lain-lain.

d. Biaya Satuan Pendidikan Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi biaya pribadi (*private unit costs*), biaya satuan publik (*public unit cost*), dan biaya satuan sosial/total (*social/total unit cost*).

- 1) Biaya pribadi (*private unit costs*) adalah biaya yang ditanggung oleh orang tua (siswa) pertahun. Biaya pribadi mencakup pengeluaran untuk sumbangan pendidikan, buku dan alat tulis, pakaian, akomodasi, transportasi, konsumsi, karyawisata, uang jajan, dan kursus.
- 2) Biaya publik (*public unit cost*) adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat, yang berarti keseluruhan biaya selain yang ditanggung oleh orang tua (siswa) pertahun.
- 3) Biaya sosial (total) (*social/total unit cost*) adalah total biaya yang ditanggung pemerintah, orangtua (siswa) dan masyarakat lain per

tahun, atau sama dengan biaya pribadi ditambah dengan biaya publik.

e. **Biaya Satuan Pendidikan Berdasarkan Keberadaannya**

Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan ke dalam biaya pendidikan faktual dan biaya pendidikan ideal.

- 1) Biaya pendidikan faktual adalah biaya-biaya yang senyatanya dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Biaya pendidikan ideal adalah biaya-biaya satuan pendidikan yang semestinya dikeluarkan agar penyelenggaraan pendidikan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang diinginkan.

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut peraturan pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain.

Peran pemerintah terhadap pendidikan telah banyak usaha yang dilakukan dalam memajukan dunia pendidikan seiring globalisasi, di antaranya yang terkait dengan pendidikan anak wajib belajar 9 tahun,

karena pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan terhadap pendidikan 9 tahun seperti subsidi SPP, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan ini diberikan ke sekolah-sekolah bertujuan agar anak-anak Indonesia secara adil mengesampingkan pendidikan minimal tamat SLTP dan kepada orang tua anak agar tidak lagi dipungut biaya sekolah (Nurlina, 2013).

Dalam menunjang kualitas pendidikan, perlu juga disediakan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, buku teks, buku pengangan guru. Khusus penyediaan buku teks, sekurang-kurangnya harus terpenuhi satu buku teks untuk setiap pelajaran yang dapat dipakai oleh setiap siswa. Untuk meningkatkan kualitas, perlu disediakan pula buku rujukan dan pengayaan serta sumber belajar lain yang dapat diakses oleh siswa dan guru. Selain perpustakaan dan buku serta sumber belajar lain juga perlu penyediaan laboratorium IPA dan komputer dan untuk tingkat SMP/MTs juga laboratorium bahasa.

Pelaksanaan program BOS mengacu pada petunjuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Buku petunjuk tersebut digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bagi seluruh pengelola pendidikan ditingkat sekolah. Masyarakat (wali siswa) dilibatkan dalam penentuan penggunaan dana BOS. Selanjutnya sekolah yang akan bertindak sebagai pengelola dan BOS.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Menurut Permendikbud No. 1 Tahun 2018, tujuan program BOS ialah untuk :

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Sasaran Dana BOS

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018, sasaran dana BOS ialah:

- a. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
- b. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

4. Efektifitas Pengelolaan Dana BOS

Efektifitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan(kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan efektifitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan, sedangkan pengelolaan suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang

dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Pelaksanaan program BOS mengacu pada petunjuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Buku petunjuk tersebut digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bagi seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah. Masyarakat (wali siswa) dilibatkan dalam penentuan penggunaan dana BOS. Selanjutnya sekolah yang akan bertindak sebagai pengelola dana BOS.

5. Satuan Biaya

Permendikbud No. 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

- a. SD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
- b. SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
- c. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
- d. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.

6. Manfaat Dana BOS dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Terhadap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan dana BOS menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan

menengah pertama negeri dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah.

Program dana BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola dan pencitraan publik. Melalui program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun
- b. Tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah
- c. Lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP;
- d. Kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara, apabila terdapat peserta didik SMP yang akan putus sekolah agar diajak kembali dibangku sekolah.
- e. Kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
- f. BOS bukan penghalang bagi peserta didik, orang tua, atau walinya dalam pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Dengan demikian, program dana BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD dan SMP. Pelaksanaan BOS ini pun masih perlu memonitoring dan evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari sekolah sebagai usaha bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global.

E.Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara umum mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Pengertian mutu pendidikan atau kualitas pendidikan hendaknya jangan dilihat secara sempit, tetapi harus diteliti secara komprehensif yang meliputi semua komponen yang membentuk sistem pendidikan. Menurut Alwi (2008: 768) mutu diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, derajat atau taraf; mutu. Dengan kata lain keunggulan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Sedangkan menurut Fattah (2012: 2) mutu adalah kemampuan dari suatu produk atau jasa dalam memuaskan pelanggan.

Kualitas atau mutu mula-mula digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal dan merupakan atribut yang membedakannya dengan benda/hal lainnya (Hamalik, 2014: 33).

pranata yang sangat dinamis dengan tugas utamanya menyiapkan umat manusia agar siap dan mampu menghadapi masa depannya.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 ayat 1 menyatakan: mutu pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Segi normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik kualitas pendidikan merupakan produk pendidikan yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik yaitu tenaga kerja yang terlatih. Segi deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kenyataannya semisal hasil prestasi belajar (Anwar, 2013: 50).

Menurut Nurkholis (2003: 67), menyebutkan bahwa mutu memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif. Menurut Anwar (2013: 51) konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Bila dipraktikkan dalam dunia pendidikan yang absolut ini bersifat etitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang mampu menawarkan kualitas tinggi pada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya, sedangkan

konsep relatif, kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur atas produk akhir dari standar yang telah ditentukan. Mutu merupakan proses terstruktur yang membantu seseorang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses pendidikan.

Mutu pendidikan disebut sebagai nilai atau suatu keadaan secara substantif. Mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah suatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam skala. Dalam konteksnya mutu yang dimaksud adalah dalam konsep relatif. Kaitannya dengan pendidikan, mutu mencakup input, proses dan output pendidikan atau dengan kata lain, bila dikaitkan dengan pendidikan maka pengertian mutu akan menyangkut dengan semua aspek yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendidik yang mempunyai tiga unsur pokok yaitu masukan, proses kegiatan dan hasil yang lebih sering dikenal dengan istilah *input*, proses dan *output* (Anwar, 2013: 52)

Sebagai gambaran dari cakupan mutu yang terdiri input, proses dan output dapat dilihat sebagai berikut:

a. Input

Sekolah yang menerapkan manajemen mutu memiliki input manajemen, dimana semua staf dalam lembaga tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tinggi rendahnya mutu input tergantung kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan input, semakin tinggi pula mutu input. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses

berjalan dengan baik. Proses bermutu tinggi bila pengoordinasian, penyesarian input harmonis sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi belajar, dan benar-benar memberdayakan siswa (Suryadi, 2012: 9-10).

Tinggi rendahnya mutu input tergantung kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan input, semakin tinggi pula mutu input. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses berjalan dengan baik. Proses bermutu tinggi bila pengoordinasian, penyesarian input harmonis sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi belajar, dan benar-benar memberdayakan siswa.

Memberdayakan siswa mengandung makna siswa menguasai ipteks yang diajarkan, menghayati, mengamalkan, dan mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output bermutu tinggi bila sekolah menghasilkan prestasi akademikk dan nonakademik siswa, dan prestasi lainnya (Baharudin, 2012: 15).

Memberdayakan siswa mengandung makna siswa menguasai iptek yang diajarkan, menghayati, mengamalkan, dan mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output bermutu tinggi bila sekolah menghasilkan prestasi akademik dan non akademik siswa, dan prestasi lainnya.

b. Proses

Proses pengembangan mutu yang dilakukan sekolah perlu melibatkan perlu melibatkan segala yang terkait sekolah khususnya

masyarakat dalam mendukung program sekolah, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik (Suryadi, 2012: 11-12).

Model peningkatan mutu pendidikan meletakkan kesadaran akan kualitas dalam lembaga pendidikan tergantung kepada faktor *intangibles*, terutama sikap manajemen tingkat atas terhadap kualitas jasa pendidikan (Rochaety, 2010: 118). Pencapaian kualitas bukan merupakan hasil penerapan cara instan jangka pendek untuk meningkatkan daya saing, melainkan melalui implementasi yang mensyaratkan kepemimpinan secara kontinu (Mulyasa, 2011: 168). Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki karakteristik pribadi yang mencakup: dorongan, motivasi untuk memimpin, kejujuran, integritas, kepercayaan diri, inisiatif, kreativitas, orisinalitas, fleksibilitas, kemampuan kognitif, pengetahuan bisnis, dan kharisma. Karena kualitas kepala sekolah tersebut akan dapat memberikan inspirasi kepada semua jajaran manajemen agar memperagakan kepemimpinan yang sama yang diperlukan untuk mengembangkan budaya mutu terpadu. Oleh sebab itu, keterlibatan langsung kepala sekolah sangat penting. Goetsch dan Davis dalam Mulyasa (2011: 169) mempertegas komitmen ini dengan pernyataan paling tidak sepertiga waktu kepala sekolah harus digunakan untuk terlibat langsung dalam usaha-usaha implementasi peningkatan mutu terpadu pendidikan. Mutu ditingkatkan sekolah, proses meliputi pelaksanaan administrasi dalam arti proses (fungsi) dan administrasi dalam arti yang sempit.

Sekolah yang efektif memiliki: a) proses belajar mengajar (PBM) yang efektivitasnya tinggi; b) kepemimpinan sekolah yang kuat; c) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; d) pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif; e) memiliki budaya mutu; f) memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis; g) memiliki kewenangan (kemandirian); h) partisipasi stakeholder tinggi; i) memiliki keterbukaan manajemen; j) memiliki kemauan dan kemampuan untuk berubah (psikologis dan fisik); k) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan; n) memiliki akuntabilitas; o) sekolah memiliki sustainabilitas (keberlangsungan hidup)

c. *Output* yang diharapkan

Sekolah memiliki *output* yang diharapkan. *Output* adalah kinerja sekolah. Setiap warga sekolah diharapkan memiliki peran dan meningkatkan kehandalan sekolah dimata masyarakat seperti mampu menciptakan prestasi baik akademik maupun non akademik (Suryadi 2012: 12-13).

Menurut Baharudin (2012: 114-116) *output* pendidikan adalah kinerja (prestasi) sekolah. Kinerja sekolah dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal:

- 1) Prestasi akademik siswa berupa ulangan umum, nilai ujian nasional, seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB), lomba karya ilmiah, lomba bahasa Inggris, lomba fisika, lomba matematika, dan sebagainya;

- 2) Prestasi non akademik siswa seperti imtaq, kejujuran, kerjasama, rasa kasih sayang, keingintahuan, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, olahraga, kesopanan, olahraga, kesenian, kepramukaan, ketrampilan, harga diri, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh tahapan kegiatan yang saling mempengaruhi (proses), yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Proses lainnya seperti kinerja sekolah dan guru meningkat, kepuasan, kepemimpinan kepala sekolah andal, jumlah peserta didik yang berminat masuk ke sekolah meningkat, jumlah putus sekolah menurun, guru dan tenaga tata usaha yang tidak hadir berkurang, hubungan sekolah masyarakat meningkat, dan kepuasan *stakeholder* meningkat.

Jadi, *output* pada umumnya diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah diukur dari efektifitas, produktivitas, efisiensi, dan inovasinya. Efektifitas merupakan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan kata lain, efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang (anggota) yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

2. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

a. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang merupakan variabel pendidikan yang menjadi salah satu faktor dominan terjadinya proses pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah yang harus ditempuh untuk mencapai selebar kertas yang disebut dengan nama ijazah atau tingkat keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan (Muslich, 2014: 1).

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelajari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung arti sesuatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish (Ramayulis, 2012: 128). Sedangkan menurut Rosyada (2013: 26) menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah itu harus ideal. Kurikulum harus berbicara tentang keharusan bukan kemungkinan.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai keseluruhan tatanan pendidikan seperti tujuan, isi dan bahan ajar yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan proses pencapaian tujuan pendidikan atau sekolah yang diaktualisasikan di kelas maupun diluar kelas sebagai pengalaman murid serta kumpulan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

b. Media/Alat Pendidikan

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Sardiman, 2014: 6).

Daradjat dalam Ramayulis (2012: 112) menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Sedangkan dalam keputusan asing, sementara ahli menggunakan istilah *audia visual aids (AVA) teaching material, instructional material*.

c. Proses Belajar Mengajar (PBM)

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam PBM tergambar bahwa adanya kegiatan yang tidak tepisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar, antara keduanya terjalin interaksi yang saling menunjang.

3. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, membutuhkan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Qamar (2007: 204) ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain yaitu :

a. Peningkatan kualitas guru

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu cara meningkatkan kualitas guru adalah mengikuti penataran, memperbanyak membaca, dan lain-lain.

b. Peningkatan materi pembelajaran

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka peningkatan materi perlu dilakukan karena materi yang akan diberikan akan menambah lebih luas akan pengetahuan.

c. Peningkatan dalam penggunaan metode

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode.

d. Peningkatan sarana

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran disekolah.

e. Strategi dalam peningkatan mutu

Seluruh manajemen komponen pendidikan harus senantiasa berorientasi pada pencapaian mutu. Semua program dalam kegiatan pendidikan serta pembelajaran di lembaga pendidikan pada dasarnya harus bias diarahkan pada pencapaian mutu. Walau hingga sekarang ini, persoalan mutu masih menjadi pembahasan di antara idealisme, belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, maka perlu dikerahkan semua pikiran, tenaga, strategi untuk bisa mewujudkan mutu tersebut dalam lembaga pendidikan.

Malalui penggarapan seluruh komponen sekolah, pendidikan bermutu tinggi apabila setiap anak didik berkembang secara optimal sesuai kemampuannya sertadapat mengembangkan kemampuan dan keahlian bagi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu tinggi akan mengantarkan anak didik ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya (Rosyada, 2013: 26).

Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya sikap terbuka dari guru-guru, guru-guru juga harus didorong agar kreatif serta memiliki kinerja yang tinggi. Tinggi rendahnya mutu dari suatu pendidikan (sekolah) dapat dilihat dari bagaimana kinerja seorang manajer puncak (kepala sekolah) dalam mengelola sekolahnya.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Sumarni (2014) dengan judul “Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kinerja pengelolaan dana BOS sudah sangat positif. Sisi positif dari pengelolaan dana BOS ini terlihat dari jenjang persiapan, proses pelaksanaan, dan kegiatan pasca pelaksanaan, dampak turunannya, dan evaluasi umum terhadap kinerja Tim BOS madrasah. Kedua, dana BOS berdampak sangat positif terhadap peningkatan mutu madrasah yang terukur dengan indikator peningkatan status akreditasi madrasah, peningkatan jumlah siswa, dan jumlah siswa tinggal kelas dan putus sekolah. Dampak positif BOS juga terekam dari fakta jejak prestasi siswa madrasah di banyak dan variasi lomba. Selain itu, dana BOS mampu meningkatkan etos sekolah dan semangat belajar siswa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Depiani (2015) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan sudah banyak yang dibeli dari dana BOS. Kedua, semenjak adanya dana BOS kegiatan ujian sekolah berjalan efektif. Ketiga, tidak terdapatnya angka putus sekolah dan tingginya semangat belajar. Keempat, pemanfaatan dana BOS untuk pembelian bahan habis pakai menjadi efektif. Kelima, pembayaran langganan daya dan jasa menjadi sangat efektif. Keenam, dana BOS membantu kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan efektif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irsan (2017) dengan judul “Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD Negeri di Kota Medan”. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Penyaluran dana BOS SD untuk Triwulan 1, 2, dan 3 tidak tepat waktu; (2) Rata-rata penggunaan dana BOS baru mencapai 94,00%; (3) Tidak semua sekolah sampel menyalurkan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: pembelian buku teks, perawatan sekolah, pembelian bahan habis pakai, dan pembayaran guru dan pegawai honor; (5) Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik; namun sudah baik dalam kepemilikan Perangkat Pembelajaran berupa Silabus dan RPP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya yang berada dibawah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	TAHUN 2018-2019																																						
		Okto ber		Nopem ber				Desem ber				Januari					Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Proposal Tesis	■	■	■	■																																			
2	Bimbingan Proposal Tesis				■	■	■	■	■																															
3	Seminar Proposal Tesis									■																														
4	Perbaikan Proposal Tesis										■	■	■	■																										
5	Surat Ijin Penelitian														■	■																								
6	Pelaksanaan Penelitian																■	■	■	■																				
7	Pengolahan Data																				■	■																		
8	Penulisan Tesis																					■	■	■	■															
9	Bimbingan Tesis																								■	■	■	■												
10	Seminar Hasil Tesis																																							
11	Perbaikan Tesis																																							
12	Ujian Tesis																																							■

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang. Terdapat 23 Sekolah Dasar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang, yang terdiri dari 21 Sekolah Dasar Negeri dan 2 Sekolah Dasar Swasta. Secara umum, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang telah menyerahkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2018 kepada 23 Sekolah Dasar yang terdapat di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang. SD Negeri dan Swasta yang menjadi fokus tempat penelitian yaitu SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif yang dipilih dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalam data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara dan data dokumentasi, sehingga data-data tersebut dapat dijadikan sumber informasi yang tepat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan efektivitas program yang di dapat dari dana BOS. Pendekatan kuantitatif dipilih karena ingin mendapatkan besaran angka biaya pendidikan beserta besaran komponen biaya satuan pendidikan tersebut menurut jenis penggunaannya. Dan untuk memaparkan perhitungan nominal angka biaya operasional pertahun untuk peserta didik serta menghitung keterserapan.

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahap-tahap penelitian. Nasution (2003: 86) menjelaskan 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu tahapan orientasi, eksplorasi dan *member check*.

1. Tahapan Orientasi

Pada tahap ini merupakan tahap persiapan dan pengumpulan data dengan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendekatan terhadap instansi terkait, dalam hal ini kepala SD Negeri Lung Manyo dan kepala SD Lembah Jaya untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi penelitian dan sekaligus mendapat ijin penelitian.
- b. Menghubungi kepala SD Negeri Lung Manyo dan kepala SD Lembah Jaya untuk mendapatkan persetujuan mengenai pelaksanaan observasi dan wawancara dalam rangka pengumpulan data.
- c. Menyiapkan pedoman wawancara serta observasi untuk responden yang telah dikonsultasikan dengan kedua dosen pembimbing.

2. Tahap Eksplorasi

Dari data yang diperoleh dari tahap orientasi, didapat gambaran yang jelas untuk dilakukan pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan wawancara intensif dengan sumber data, selain itu juga melakukan observasi dan analisa dokumen, sehingga dapat diperoleh data dengan lengkap. Tahapan pekerjaan eksplorasi merupakan implementasi kegiatan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menentukan sumber data yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi tentang penelitian.
 - b. Menyusun kembali pedoman wawancara dan observasi resmi yang berkembang waktu di lapangan yang merupakan instrumen pembantu peneliti.
 - c. Melakukan wawancara intensif dengan nara sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - d. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi untuk melengkapi data primer
 - e. Menyusun hasil laporan, yang meliputi hasil kegiatan yang menggambarkan, menganalisa dan menafsirkan data hasil penelitian secara berkesinambungan hingga selesai.
3. Tahap *Member Check*

Tahap *member check* merupakan kegiatan atau tahap pengecekan kebenaran dari data serta informasi yang di kumpulkan agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Tahapan kegiatan ini meliputi:

- a. Melaksanakan analisa terhadap data dan informasi yang dikumpulkan kemudian hasilnya disampaikan atau dilaporkan pada masing-masing responden atau sumber data untuk dikonfirmasi sesuai data dan informasi yang masih diperlukan.
- b. Meminta penjelasan lebih lanjut kepada responden bila dianggap perlu untuk melengkapi data dan informasi yang masih diperlukan.
- c. Mengecek kembali kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh responden.

D. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi;
 - a. Kepala SD Negeri Lung Manyo, kepala SD Lembah Jaya, Wakil Kepala sekolah, dan Bendahara.
 - b. Pegawai, pengambilan datanya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang diharapkan peneliti (Sugiyono, 2015: 300).
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder digunakan yaitu, studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip dari berbagai konsep yang terdiri dari banyaknya literatur baik dari buku, jurnal, majalah, koran, dan karya tulis lainnya ataupun dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto-foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti terutama dokumentasi-dokumentasi yang ada di SD Negeri Lung Manyo dan SD Lembah Jaya.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dan prosedur pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian yang sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Arikunto (2012: 57) observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pendayagunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Lung Manyo dan SD Lembah Jaya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum, lingkungan sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, keadaan dan fasilitas pendidikan, kondisi belajar siswa, keadaan manajemen-manajemen mulai dari kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, dan lain sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya-jawab sepihak (Arikunto, 2012 : 44). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara ini memberikan kebebasan pada subjek penelitian yang seluas-luasnya dalam menjawab pertanyaan, memberikan pandangan, pendapat dan sikap tanpa dipengaruhi oleh pewawancara.

Wawancara digunakan untuk mengungkap fakta dan opini yang belum dapat dijelaskan melalui rancangan keuangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara meliputi anggaran biaya sekolah per sekolah, pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah, dan analisis penyerapan dana operasional (BOS) dari pemerintah untuk sekolah.

3. Dokumentasi

Studi dokumen yaitu mengkaji berbagai dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan di tingkat satuan sekolah. Dokumen yang dikaji adalah Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari triwulan I sampai triwulan IV tahun 2018, realisasi penggunaan dan dokumen keuangan lainnya.

F. Prosedur Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka dilakukan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat deskriptif kuantitatif dikumpulkan dan dihitung. Perhitungan biaya satuan pendidikan dari pemerintah yaitu biaya operasional. Caranya dengan merinci ke dalam sub-sub komponen biaya dan menjumlahkannya secara keseluruhan. Satuan biaya atau pengeluaran untuk setiap sub komponen atau aktivitas dapat berbeda-beda per triwulan. Sebelum menganggarkan biaya satuan pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya, bagian bendahara telah membuat rencana dalam menganggarkan biaya-biaya keluaran yang berhubungan dengan keperluan

pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Berikut perhitungan anggaran yang dibuat pada bulan Desember 2017 diperuntukkan anggaran tahun 2018:

1. Biaya pendidikan dari pemerintah atau dana BOS digunakan dalam pembiayaan kegiatan peserta didik di sekolah. Program dari pemerintah tersebut adalah pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan dan pengembangan perpustakaan.
2. Target program yang didanai oleh pemerintah adalah BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun, dan memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam atau alat tulis sekolah dan biaya lainnya.
3. Hasil realisasi program yang didanai oleh pemerintah adalah perbandingan hasil dari rencana dan realisasi program.
4. Efektivitas program yang didanai adalah karena dana yang tersedia dari pemerintah, maka setiap rencana yang dibuat segera terlaksana dan terealisasi.
5. Rencana anggaran biaya pendidikan per triwulan:
Dana yang diperoleh = jumlah peserta didik x anggaran BOS per triwulan
6. Jumlah Biaya Operasional Sekolah dalam 1 tahun

Jumlah anggaran = dana yang diperoleh padatriwulan I + II + III + IV

7. Biaya yang telah terealisasi

Biaya operasional yang berasal dari pemerintah yang telah digunakan pihak sekolah dalam kebutuhan dan kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah.

Kemudian, data yang bersifat kualitatif dianalisis melalui tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2015:337).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

Dengan demikian reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah disusun dalam laporan lapangan dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Selanjutnya laporan yang telah direduksi dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok dan relevan dengan fokus penelitian, hal ini diharapkan memperoleh gambaran yang relatif sesuai dengan keadaan di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penataan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan agar lebih mudah dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kesimpulan dapat diambil selama proses analisis data dan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Data yang sudah dianalisis, diklasifikasikan dan disajikan, selanjutnya dapat disimpulkan oleh peneliti. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara berulang-ulang, mempelajari kajian yang berhubungan dengan penelitian, dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin signifikansi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini diambil dari proses analisis data yang telah melalui proses pengklasifikasian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah SD Negeri Lung Manyo Kec. Manyak Payed

SD Negeri Lung Manyo salah satu SD Negeri yang dibangun tahun 1977 di Desa Lung Manyo Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. SD Negeri Lung Manyo memiliki 6 ruang kelas, satu ruang pustaka, 1 ruang UKS, 5 ruang guru. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lung Manyo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Seunebok Pidie, sebelah utara berbatasan dengan Kota Langsa dan sebelah selatan berbatasan dengan Ie Puteh.

Adapun beberapa Kepala Sekolah yang pernah memimpin sekolah ini yaitu tahun 1977-1986 dipimpin oleh Zulkifli, tahun 1987-1989 dipimpin oleh Hanafiah, A.Ma.Pd, tahun 1990-1993 dipimpin oleh Mahyal Fahri S.Pd, tahun 1994-1997 dipimpin oleh Bahtiar, S.Pd, tahun 1998-2014 dipimpin oleh Netty Sumarni, S.Pd dan tahun 2015-Sekarang dipimpin oleh : H.Suria Bakti, S.Pd.

SD Negeri Lung Manyo salah satu negeri imbas dari Putroe ijo sebagai intinya. SD Negeri Lung Manyo memiliki 6 guru kelas dan satu guru agama. Jarak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan SD Negeri Lung Manyo adalah 30 km. Mata pencaharian penduduk desa Lung Manyo adalah nelayan, petani, buruh, pedagang dan bengkel.

a. Visi

Perkembangan dan tantangan masa depan antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, dan tuntutan implementasi kurikulum 2013 pada kelas I, II, IV dan V dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespons tantangan tantangan sekaligus peluang itu. SD Negeri Lung Manyo Kecamatan Manyak Payed memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam visi sekolah berikut :**“Terwujudnya Siswa Beriman Kepada Allah Swt, Berkarakter, Berprestasi Di Bidang Akademik Non Akademik, Berbudi Pekerti Luhur, Berkepribadian Mulia”**

b. Misi

Berdasarkan Visi di atas, maka Sekolah Dasar Negeri Lung Manyo Kecamatan Manyak Payed menyusun misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelajaran dan bimbingan secara efektif.
- 2) Menumbuhkan semangat keunggulan serta intensif kepada seluruh warga sekolah.
- 3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
- 4) Menanamkan pendidikan karakter bangsa pada seluruh siswa.

c. Tujuan

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar Negeri Lung Manyo adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan warga sekolah bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia
- 2) Menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional
- 3) Memperkuat penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi
- 4) Menciptakan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang berkualitas
- 5) Terpenuhinya fasilitas pembelajaran sehingga memudahkan penyerapan materi pembelajaran.
- 6) Menciptakan peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen melalui implementasi MBS
- 7) Menciptakan dalam disiplin, budi pekerti dan kepedulian sosial

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi SD Negeri Lung Manyo dapat dilihat pada lampiran tesis ini.

e. Sarana Prasarana SD Negeri Lung Manyo

Terdiri dari 6 kelas satu ruang kepala sekolah, satu pustaka, 3 ruang WC, 3 Rumah guru, 2 ruang guru, 1 ruang UKS dan 3 kantin sekolah, satu tempat parkir. Halaman sekolah ada 2 ranse dipagar bagian depan.

kiri kanan dan belakang belum ada pagar. Prasarana KIT IPA, SEQIP IPA, Meja tenis, buku K-13, Buku penunjang, meja belajar ada 123 meja kursi 123 buah, meja guru ada 6 pasang lemari ada 6 buah. sarana bermain cukup baik. Meja tamu, meja kantor guru ada 6 buah lemari arsip ada 3 buah, laptop sekolah ada 2 printer ada 4 buah, infokus sekolah ada satu beserta layar monitor satu buah.

2. Sejarah SD Swasta Lembah Jaya Kec. Manyak Payed

SD Swasta Lembah Jayasalah satu SD Swasta yang dibangun tahun 1971 di Desa Lembah Jaya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. SD Swasta Lembah Jaya memiliki 6 ruang kelas, satu ruang pustaka, 1 ruang kepala sekolah. Sebelah utara berbatasan dengan Birem Bayen, sebelah selatan berbatasan dengan Paya Ketenggar, sebelah timur berbatasan dengan Bukit tiga Aceh Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Karang Baru Alue Punti

SD Swasta Lembah Jaya dipimpin oleh 8 kepala sekolah yaitu tahun 1971-1986 dipimpin oleh Sionani, tahun 1987-1989 dipimpin oleh Johan Djauhari, tahun 1990-1993 dipimpin oleh Ramlah S.Pd, tahun 1994-2003 dipimpin oleh Marlisa, S.Pd, tahun 2004-2009 dipimpin oleh Idris, S.Pd, tahun 2010-2015 dipimpin oleh Agustiar, S.Pd, tahun 2016-2017 dipimpin oleh Samsuar, S.Pd dan tahun 2018 sampai sekarang oleh Mawarwaty, S.Pd.I.

SD Swasta Lembah Jayasalah satu negeri imbas dari gugus Malahayati sebagai intinya. SD Swasta Lembah Jaya memiliki 6 guru kelas satu guru

agama. Jarak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan SD Swasta Lembah Jaya adalah 32 km.

a. Visi

Perkembangan dan tantangan masa depan antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, dan tuntutan implementasi kurikulum 2013 pada kelas I,II, danIV, V juga peran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memacu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus peluang tersebut. SD Swasta Lembah Jaya memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam visi sekolah sebagai berikut : **“Terwujudnya Siswa Beriman Kepada Allah Swt,Berprestasi,Berbudi Pekerti Luhur, Berkarakter, Jujur, Serta Terciptanya Lingkungan Yang Asri”**.

b. Misi

Untuk mencapai Visi Sekolah Dasar Swasta Lembah Jaya yang disusun bersama Tim pengembang Kurikulum dan /atau Pengembang Sekolah, diperlukan komponen pencapaian melalui Misi sebagai berikut:

- 1) Membentuk generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas , terampil, kreatif, berdedikasi, serta cinta tanah air bangsa dan Negara.
- 2) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.

- 3) Membentuk sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman
- 4) Mengembangkan bakat, keterampilan, dan teknologi maupun ilmu agama
- 5) Membina dan Meningkatkan budi pekerti luhur, berakhlak mulia, jujur di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.
- 6) Menumbuhkan dan membina rasa cinta pada lingkungan sehinggatercipta lingkungan yang asri.

c. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, maka tujuan sekolah, SD Swasta Lembah Jaya dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut ini.

- 1) Membekali siswa supaya memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, sesuai dengan tingkat kompetensi dan standar ketuntasan belajar yang telah ditetapkan guna melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga mampu berkompetisi dalam lingkungan global
- 2) Meraih prestasi akademik minimal tingkat Kabupaten / Kota.
- 3) Membekali siswa untuk memiliki kreatifitas tinggi dan mampu melakukan inovasi-inovasi sebagai bekal kehidupan dimasa yang akan datang

- 4) Mengembangkan proses pembelajaran dengan pendekatan 4 pilar pendidikan: *Learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together.*
- 5) Membekali siswa untuk memiliki kreatifitas tinggi dan mampu melakukan inovasi-inovasi sebagai bekal kehidupan dimasa yang akan datang
- 6) Membekali siswa supaya memiliki kemampuan dasar agama, akhlak mulia, budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi
- 7) Memberdayakan peran serta siswa dimasyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi SD Swasta Lembah Jaya dapat dilihat pada lampiran tesis ini.

e. Sarana Prasarana SD Swasta Lembah Jaya

Terdiri dari 6 kelas satu ruang kepala sekolah, satu pustaka, 2 ruang WC, dan 1 kantin sekolah, satu tempat parkir. berdiri diatas bukit luas sekolah lebih kurang ada 4 rante. Halaman sekolah tidak dipagar bagian depan. kiri kanan dan belakang belum ada pagar. Prasarana KIT IPA, buku K-13, Buku penunjang, meja belajar ada 97 meja kursi 97 buah, meja guru ada 6 pasang lemari ada 6 buah. sarana bermain cukup baik. Meja tamu, meja kantor guru ada 6 buah lemari arsip ada 1 buah, laptop sekolah ada 1 printer ada 1 buah.

B. Temuan Penelitian

1. Efektivitas Pendayagunaan BOS dalam Pembiayaan Mutu Pendidikan Terkait 8 Standar di SD Negeri Lung Manyo

Pendayagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo tertera dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS sekolah, yang harus dibuat dipertengahan tahun atau pada saat menjelang pembelajaran tahun ajaran baru tahun berjalan dan anggarannya dibuat selama 1 tahun yang yang dialokasikan per program, per mata anggaran setiap triwulan dengan perhitungannya mengacu kepada jumlah peserta didik terbaru pada tahun ajaran berjalan yaitu sekitar bulan Juni. Berikut perhitungan anggaran SD Negeri Lung Manyo yang diperuntukan anggaran 2018.

$$\begin{aligned} \text{Dana yang diperoleh} &= \text{jumlah peserta didik} \times \text{anggaran dana BOS/siswa} \\ &= 133 \text{ anak} \times \text{Rp. } 800.000 \\ &= \text{Rp. } 106.400.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Anggaran} &= \text{Rp. } 21.280.000 + 42.560.000 + 21.280.000 + \\ &21.280.000 \\ &= \text{Rp. } 106.400.000 \end{aligned}$$

Berikut penjelasan mengenai efektivitas program di SD Negeri Lung Manyo untuk tahun anggaran 2018.

a. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi lulusan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo

yaitu pengadaan soal triout, pengayaan dan pemantapan persiapan ujian mata pelajaran kelas 6, pembayaran lunas penggandaan soal dan LJK THB semester II (dua), biaya pelaksanaan ujian us nasional kelas 6, biaya pengadaan soal ujian dan LJK THB Semester Ganjil TP 2018/2019 dan panitia US nasional. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pengembangan Kompetensi Lulusan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Kompetensi Lulusan	7.856.000				
Pengadaan Soal triout	765.000	765.000			
Pengayaan dan Pemantapan persiapan Ujian Matapelajaran kelas 6	960.000	960.000			
Pembayaran lunas penggandaan soal dan LJK THB semester II (dua).	2.631.000		2.631.000		
Biaya Pelaksanaan Ujian US Nasional Kelas 6	570.000		570.000		
Biaya Pengadaan Soal Ujian dan LJK THB Semester Ganjil TP 2018 / 2019	2.630.000				2.630.000
Panitia US Nasional	300.000		300.000		

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan kompetensi lulusan yaitu sebesar Rp. 7.856.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk pengadaan soal triout sebesar Rp. 765.000 dan terealisasi pada triwulan I, pengayaan dan pematapan persiapan ujian mata pelajaran kelas 6 sebesar Rp. 960.000 dan terealisasi pada triwulan I, pembayaran lunas penggandaan soal dan LJK THB semester II (dua) sebesar Rp. 2.631.000 dan terealisasi pada triwulan II, biaya pelaksanaan ujian us nasional kelas 6 sebesar Rp. 570.000 dan terealisasi pada triwulan II, biaya pengadaan soal ujian dan LJK THB Semester Gajil TP 2018/2019 sebesar Rp. 2.630.000 dan terealisasi pada triwulan IV dan anggaran panitia US nasional sebesar Rp. 300.000 dan terealisasi pada triwulan II. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Negeri Lung Manyo memberikan perubahan positif pada, dimana kompetensi lulusan meningkat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 61,47 menjadi 70,76 (terlampir), selain itu siswa meraih juara dua cerdas cermat tingkat UPTD, juara FLS2N (SK O2SN, FLS2N pantomin dan menari tingkat UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V terlampir).

b. Efektivitas Pengembangan Standar Isi

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar isi dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu biaya pelatihan dan rapat kepala sekolah. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Isi

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Isi	1.200.000				
Biaya pelatihan dan rapat kepala sekolah			600.000	300.000	300.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar isi di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 1.200.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya pelatihan dan rapat kepala sekolah direalisasikan pada triwulan II sebesar Rp. 600.000, pada triwulan III sebesar Rp. 300.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 300.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS pengembangan standar isi terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo. Terealisasinya anggaran dana BOS pada pengembangan standar isi menunjukkan bahwa kurikulum sekolah K-13 tersedia di SD Negeri Lung Manyo (SK TIM Kurikulum-13 terlampir).

c. Efektivitas Pengembangan Standar Proses

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar proses dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu pendaftaran peserta pada kegiatan Olympiade Siswa Nasional (OSN) UPTD, alat tulis kantor (ATK) KBM, pendaftaran peserta pada kegiatan O2SN, FL2N dan literasi tingkat UPTD Pendidikan V, biaya pendaftaran peserta pada kegiatan seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi, biaya pembelian trophy dalam lomba kebersihan sekolah, pembayaran cetak sampul raport kelas 1, pembayaran lunas uang pendaftaran lomba O2SN di UPTD V pada bulan April 2017, biaya ikut lomba FLS2N di UPTD V Manyak Payed Tualang Cut, biaya pengadaan saran penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), biaya belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, uang transport untuk guru pelatihan, pembelian alat rumah tangga Sekolah, uang transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank BPD Aceh Kualasimpang. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Proses

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Proses	25.470.499				
Pendaftaran Peserta pada Kegiatan Olympiade Siswa Nasional	600.000	600.000			

(OSN) UPTD					
Alat tulis kantor (ATK) KBM	2.200.000	650.000	500.000	450.000	600.000
Pendaftaran peserta pada Kegiatan O2SN, FL2N dan Literasi Tingkat UPTD Pendidikan V	1.600.000	1.600.000			
Biaya Pendaftaran peserta pada Kegiatan Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi	600.000	600.000			
Biaya Pembelian Tropy dalam Lomba kebersihan Sekolah	130.000	130.000			
Pembayaran Cetak sampul Raport Kelas 1	225.000		225.000		
Pembayaran lunas uang pendaftaran lomba O2SN di UPTD V pada bulan April 2017.	600.000		600.000		
Biaya Ikut lomba FLS2N di UPTD V Manyak Payed Tualang Cut	3.200.000		3.200.000		
Biaya Pengadaan Saran Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	815.000		315.000	300.000	200.000
Biaya Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	11.786.499	3.035.700	3.024.100	2.430.100	3.296.599
Belanja peralatan kebersihan dan bahan	2.060.000	560.000	500.000	500.000	500.000

pembersih.					
Uang transport untuk guru pelatihan	45.000		45.000		
Pembelian Alat rumah tangga Sekolah	909.000		303.000	303.000	303.000
Uang transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank BPD Aceh Kualasimpang	700.000	100.000	250.000	100.000	250.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar proses di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 25.470.499 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya pendaftaran peserta pada kegiatan Olympiade Siswa Nasional (OSN) UPTD sebesar Rp. 600.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya alat tulis kantor (ATK) KBM sebesar Rp. 2.200.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 650.000, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 500.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 450.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 600.000.

Biaya pendaftaran peserta pada kegiatan O2SN, FL2N dan literasi tingkat UPTD Pendidikan V dianggarkan sebesar Rp. 1.600.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pendaftaran peserta pada kegiatan seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi dianggarkan sebesar Rp. 600.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pembelian tropy dalam lomba kebersihan sekolah dianggarkan sebesar Rp. 130.000 dan

teralisasi pada triwulan I. Biaya pembayaran cetak sampul raport kelas 1 dianggarkan sebesar Rp. 225.000 dan terealisasi pada triwulan II. Biaya pembayaran lunas uang pendaftaran lomba O2SN di UPTD V pada bulan April 2017 dianggarkan sebesar Rp. 600.000 dan terealisasi pada triwulan II. Biaya ikut lomba FLS2N di UPTD V Manyak Payed Tualang Cut dianggarkan sebesar Rp. 3.200.000 dan terealisasi pada triwulan II. Biaya pengadaan saran penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dianggarkan sebesar Rp. 815.000 terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 315.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 300.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 200.000.

Biaya belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dianggarkan sebesar Rp. 11.786.499 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 3.035.700, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 3.024.100, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 2.430.100 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 3.296.599. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dianggarkan sebesar Rp. 2.060.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 560.000, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 500.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 500.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 500.000.

Uang transport untuk guru pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 45.000 dan terealisasi pada triwulan II. Pembelian alat rumah tangga Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 909.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 303.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp.

303.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 303.000. Uang transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank BPD Aceh Kualasimpang dianggarkan sebesar Rp. 700.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 100.000, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp. 250.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 100.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 250.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar proses terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan standar proses, perubahan yang terjadi di SD Negeri Lung Manyo yaitu salah seorang guru telah memiliki Prota, Promes, RPP dan penilaian K-13 mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Guru kelas IV dan kelas VI juga sesekali mengajar dengan menggunakan proyektor (SK Pembagian Tugas terlampir)

d. Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu biaya kegiatan pelatihan kinerja guru sekolah pada tanggal 25-26 Januari 2018, pelatihan dan rapat rutin kepala sekolah, biaya kegiatan extra kurikuler pada SD Negeri Lung Manyo, biaya ikut pelatihan guru kelas, biaya kegiatan pelatihan K13, biaya sosialisasi regulasi PTK, biaya sosialisasi RKAS dan LRA, biaya

kegiatan pelatihan kurikulum sekolah, biaya kegiatan pelatihan kompetensi guru kelas, biaya kegiatan pelatihan aplikasi nilai raport, biaya kegiatan KKG, biaya pelatihan senam guru penjaskes dan biaya kegiatan rapat KKKS. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Rincian Anggaran Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.615.000				
Biaya Kegiatan Pelatihan Kinerja Guru Sekolah pada Tanggal 25 - 26 Januari 2018	400.000	400.000			
Pelatihan dan Rapat Rutin Kepala Sekolah	400.000	400.000			
Biaya Kegiatan Exstra Kurikuler pada SD Negeri Lung Manyo	150.000	150.000			
Biaya Ikut Pelatihan Guru Kelas	170.000		170.000		
Biaya Kegiatan Pelatihan K13	1.225.000			1.225.000	
Biaya Sosialisasi Regulasi PTK	500.000			500.000	
Biaya Sosialisasi RKAS dan LRA	260.000			260.000	
Biaya Kegiatan Pelatihan Kurikulum Sekolah	260.000			260.000	
Biaya Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru Kelas	350.000				350.000

Biaya Kegiatan Pelatihan Aplikasi Nilai Raport	1.600.000				1.600.000
Biaya Kegiatan KKG	1.000.000			500.000	500.000
Biaya Pelatihan Senam Guru Penjaskes	800.000				800.000
Biaya Kegiatan Rapat KKKS	500.000		100.000	200.000	200.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 7.615.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya kegiatan pelatihan kinerja guru sekolah pada tanggal 25-26 Januari 2018 dianggarkan sebesar Rp. 400.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pelatihan dan rapat rutin kepala sekolah dianggarkan sebesar Rp. 400.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya kegiatan ekstra kurikuler pada SD Negeri Lung Manyo dianggarkan sebesar Rp. 150.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya ikut pelatihan guru kelas, biaya kegiatan pelatihan K13 dianggarkan sebesar Rp. 1.225.000 dan terealisasi pada triwulan III.

Biaya sosialisasi regulasi PTK dianggarkan sebesar Rp. 500.000 dan terealisasi pada triwulan III. Biaya sosialisasi RKAS dan LRA dianggarkan sebesar Rp. 260.000 dan terealisasi pada triwulan III. Biaya kegiatan pelatihan kurikulum sekolah dianggarkan sebesar Rp.

260.000 dan terealisasi pada triwulan III. Biaya kegiatan pelatihan kompetensi guru kelas dianggarkan sebesar Rp. 350.000 dan terealisasi pada triwulan IV. Biaya kegiatan pelatihan aplikasi nilai raport dianggarkan sebesar Rp. 1.600.000 dan terealisasi pada triwulan IV. Biaya kegiatan KKG dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000 dan terealisasi pada triwulan III sebesar Rp. 500.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 500.000. Biaya pelatihan senam guru penjaskes dianggarkan sebesar Rp. 800.000 dan terealisasi pada triwulan IV. Biaya kegiatan rapat KKKS dianggarkan sebesar Rp. 500.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 100.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 200.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 200.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Lung Manyo berdampak kepada salah seorang guru kelas V yaitu Bapak Jamaluddin S.Pd lulus mengikuti lomba guru Olimpiade Guru Nasional (OGN) di tingkat Provinsi Banda Aceh (Surat Perintah Tugas OGN Terlampir).

e. Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan sarana dan prasarana dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu biaya

tempah lemari kaca kantor sekolah, biaya tempah pintu ruang belajar sekolah, pemeliharaan dan perawatan printer sekolah sekolah, pemeliharaan dan perawatan service mesin potong rumput sekolah, biaya pemeliharaan dan service internet sekolah, biaya pembelian paku beton, biaya pembelian alat dokumentasi sekolah, biaya pemeliharaan dan perawatan taman dan lapangan sekolah, biaya pemeliharaan dan perawatan pagar sekolah, biaya pemeliharaan inventaris bangunan, biaya tempah lemari kaca kantor sekolah, biaya perawatan gedung sekolah, biaya rehab dan perbaikan sekolah, biaya pembelian tong sampah besi dan biaya pembelian sampul raport kelas I. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Rincian Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	22.287.000				
Biaya Tempah lemari kaca Kantor Sekolah	3.100.000	2.400.000		700.000	
Biaya Tempah Pintu Ruang Belajar Sekolah	3.750.000	1.950.000		1.800.000	
Pemeliharaan dan Perawatan Printer Sekolah Sekolah	1.710.000	1.110.000			600.000
Pemeliharaan dan Perawatan Service Mesin Potong Rumput Sekolah	120.000	120.000			
Biaya Pemeliharaan dan Service Internet Sekolah	900.000	900.000			
Biaya Pembelian	150.000	150.000			

Paku Beton					
Biaya Pembelian Alat Dokumentasi Sekolah	254.000		55.000	199.000	
Biaya Pemeliharaan dan Pertawatan Taman dan Lapangan Sekolah	1.123.000		422.500	400.500	300.000
Biaya Pemeliharaan dan Pertawatan Pagar Sekolah	2.299.000		2.299.000		
Biaya Pemeliharaan inventaris Bangunan	179.000		179.000		
Biaya Tempah Lemari Kaca Kantor Sekolah	1.300.000			1.300.000	
Biaya Perawatan Gedung Sekolah	1.000.000			1.000.000	
Biaya rehab dan perbaikan Sekolah	1.590.000			700.000	890.000
Biaya Pembelian Tong Sampah Besi	3.406.000			1.000.000	2.406.000
Biaya Pembelian Sampul Raport Kelas I	1.406.000			1.406.000	

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 22.287.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya tempah lemari kaca kantor sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 2.400.000, pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 700.000. Biaya tempah pintu ruang belajar sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.750.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp.

1.950.000 dan pada triwulan III terealisasi sebesar Rp. 1.800.000. Pemeliharaan dan perawatan printer sekolah dianggarkan sebesar Rp. 1.710.000 dan pada triwulan I terealisasi sebesar Rp. 1.110.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 600.000.

Biaya pemeliharaan dan perawatan service mesin potong rumput sekolah dianggarkan sebesar Rp. 120.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pemeliharaan dan service internet sekolah dianggarkan sebesar Rp. 900.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pembelian paku beton dianggarkan sebesar Rp. 150.000 dan terealisasi pada triwulan I. Biaya pembelian alat dokumentasi sekolah dianggarkan sebesar Rp. 254.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 55.000 dan pada triwulan III sebesar Rp. 199.000. Biaya pemeliharaan dan perawatan taman dan lapangan sekolah dianggarkan sebesar Rp. 1.123.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 422.500, pada triwulan III sebesar Rp. 400.500 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 300.000. Biaya pemeliharaan dan perawatan pagar sekolah dianggarkan sebesar Rp. 2.299.000 dan terealisasi pada triwulan II. Biaya pemeliharaan inventaris bangunan dianggarkan sebesar Rp. 179.000 dan terealisasi pada triwulan II. Biaya tempah lemari kaca kantor sekolah dianggarkan sebesar Rp. 1.300.000 dan terealisasi pada triwulan III. Biaya perawatan gedung sekolah dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000 dan terealisasi pada triwulan III. Biaya rehab dan perbaikan sekolah dianggarkan sebesar Rp. 1.590.000 dan terealisasi pada triwulan III sebesar Rp. 700.000 dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp.

890.000. Biaya pembelian tong sampah besi dianggarkan sebesar Rp. 3.406.000 dan terealisasi pada triwulan III sebesar Rp. 1.000.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 2.406.000. Biaya pembelian sampul raport kelas I dianggarkan sebesar Rp. 1.406.000 dan terealisasi pada triwulan III. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana di SD Negeri Lung Manyo berdampak pada penambahan sarana dan prasarana di sekolah, yaitu pembelian meja dan kursi kelas V sebanyak lima buah, kursi besi panjang, serta terpasangnya jerjak besi kantor dan perpustakaan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dilingkungan sekolah.(inventaris barang terlampir)

f. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar pengelolaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu biaya cetak dan foto copy. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pengelolaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Pengelolaan	1.406.000				
Biaya cetak dan foto copy	1.406.000	506.000		400.000	500.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar pengelolaan yaitu sebesar Rp. 1.406.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk cetak dan foto copy terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 506.000, pada triwulan III sebesar Rp. 400.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 500.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan berdampak dengan adanya SK Tim dana BOS dan SK pembagian tugas untuk setiap guru di lingkungan SD Negeri Lung Manyo (Struktur tugas Guru terlampir).

g. Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar pembiayaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu honorarium guru dan pegawai honorer (GTT & PTT), biaya snak dan minum guru harian sekolah selama 3 bulan, insentif bagi tim penyusunan laporan BOS, langganan koran dan majalah, langganan daya dan jasa listrik, langganan daya dan jasa internet, konsumsi tamu

rapat rutin sekolah dan insentif bendaharawan BOS. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pembiayaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Pembiayaan	19.285.501				
Honorarium guru dan pegawai honorer (GTT & PTT).	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Biaya snak dan Minum guru harian Sekolah selama 3 Bulan	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Insentif bagi tim penyusunan laporan BOS.	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Langganan koran dan Majalah	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Langganan daya dan jasa : listrik.	1.330.500	368.300	311.400	321.400	329.400
Langganan daya dan jasa : internet.	3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Konsumsi tamu rapat Rutin Sekolah	-				
Insentif bendaharawan BOS.	2.655.001		855.000	900.000	900.001

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 19.285.501 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk honorarium guru dan pegawai honorer

(GTT & PTT) dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.800.000, pada triwulan II sebesar Rp. 1.800.000, pada triwulan III sebesar Rp. 1.800.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 1.800.000. Biaya snack dan minum guru harian sekolah selama 3 bulan dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 300.000, pada triwulan II sebesar Rp. 300.000, pada triwulan III sebesar Rp. 300.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 300.000. Insentif bagi tim penyusunan laporan BOS dianggarkan sebesar Rp. 2.400.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 600.000, pada triwulan II sebesar Rp. 600.000, pada triwulan III sebesar Rp. 600.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 600.000.

Biaya langganan koran dan majalah dianggarkan sebesar Rp. 900.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 225.000, pada triwulan II sebesar Rp. 225.000, pada triwulan III sebesar Rp. 225.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 225.000. Biaya langganan daya dan jasa listrik dianggarkan sebesar Rp. 1.330.500 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 368.300, pada triwulan II sebesar Rp. 311.400, pada triwulan III sebesar Rp. 321.400 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 329.400. Biaya langganan daya dan jasa internet dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 900.000, pada triwulan II sebesar Rp. 900.000, pada triwulan III sebesar Rp. 900.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 900.000. Biaya insentif bendaharawan BOS dianggarkan sebesar Rp. 2.655.001 dan

teralisasi pada triwulan II sebesar Rp. 855.000, pada triwulan III sebesar Rp. 900.000 dan pada triwulan IV teralisasi sebesar Rp. 900.001. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan teralisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan menunjukkan dampak perubahan, dimana dengan adanya dana BOS tersebut pihak sekolah dapat membuat laporan SPJ, buku kas umum, K1, K2, K3 sampai K7 dan K7A serta adanya laporan untuk pembayaran listrik (RKAS Terlampir).

h. Efektivitas Pengembangan Perpustakaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo yaitu pengadaan buku teks siswa dan pengadaan buku pegangan guru. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Rincian Anggaran Pengembangan Perpustakaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan perpustakaan	21.280.000				
Pengadaan Buku Teks Siswa	21.110.800		16.068.400	5.042.400	
Pengadaan Buku Pegangan Guru	169.200		169.200		

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk

pengembangan perpustakaan di SD Negeri Lung Manyo. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan perpustakaan yaitu sebesar Rp. 21.280.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya pengadaan buku teks siswa dianggarkan sebesar Rp. 21.110.800 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 16.068.400 dan pada triwulan III sebesar Rp. 5.042.400. Kemudian biaya pengadaan buku pegangan guru dianggarkan sebesar Rp. 169.200 dan terealisasi pada triwulan II. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan terealisasi secara efektif di SD Negeri Lung Manyo.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan di SD Negeri Lung Manyo, memberikan dampak perubahan dimana tersedianya buku K-13 untuk setiap siswa, tersedianya buku-buku rujukan, perbaikan ruang perpustakaan serta terpasangnya jerjak pintu besi untuk pengamanan ruang perpustakaan.

Realisasi anggaran tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara yang menangani dana BOS. Program dana BOS ini sudah dirasakan oleh pihak sekolah pada SD Negeri Lung Manyo sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lung Manyo menerangkan bahwa:

“ Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintahan Republik Indonesia yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak Sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dibagi terhadap 4 (empat) termin penarikan yakni : Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember”. (Kepsek, 10/01-2019).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Lung Manyo yang menerangkan:

“ bahwa benar mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo sampai dengan tahun anggaran saat ini”. (Wakasek, 10/01-2019)

Sejak adanya program dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo setiap tahun anggarannya bertambah, dimana pertambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2018 yang telah menetapkan jumlah besaran dana Bos yang diterima oleh pihak sekolah didasarkan pada perkalian jumlah siswa setiap tahunnya dengan dana bantuan yang ditetapkan. Maka jumlah penerimaan dana BOS yang ada pada tahun Anggaran 2018 pada SD Negeri Lung Manyo dapat dilihat dari keterangan kepala sekolah yang menerangkan sebagai berikut:

“ Bahwa dana BOS yang diterima oleh pihak SD Negeri Lung Manyo untuk tahun anggaran 2018 didasarkan atas perhitungan yang telah ditetapkan peraturan mengenai dana BOS yakni jumlah keseluruhan siswa dikalikan bantuan sebesar Rp. 800.000/ setiap siswa dengan total keseluruhan dana BOS yang masuk ke Kas Sekolah sebesar : $(133 \text{ siswa} \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 106.400.000$ ” (Kasek, 10/01-2019).

Bahwa keseluruhan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo masuk ke Rekening Sekolah atas nama tandatangan (*spicement*) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah pada SD Negeri Lung Manyo. Dimana seluruh dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh

pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah yang telah disepakati bersama-sama oleh Kepala sekolah, Dewan guru dan Komite sekolah.

Bahwa dalam pelaksanaan dana bantuan BOS tersebut semaksimal mungkin diupayakan untuk menghindari dan membebaskan siswa dari seluruh pungutan yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini telah dilaksanakan secara nyata oleh pihak sekolah dalam berbagai kegiatan yang nyata (real) pada sekolah SD Negeri Lung Manyo yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang bersumber dari dana BOS sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala SD Negeri Lung Manyo sebagai berikut:

“ Bahwa saya selaku kepala sekolah SD Negeri Lung Manyo secara nyata telah menggunakan dana BOS tersebut untuk kegiatan-kegiatan sekolah antara lain : 1) pengembangan kompetensi lulusan, 2) pengembangan kurikulum, 3) pengembangan proses pembelajaran, 4) pengembangan peserta didik dan kependidikan, 5) pengembangan sarana dan prasarana, 6) pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, 7) pengembangan dan penggalan sumber dana pendidikan dan 8) pengembangan perpustakaan”. (Kasek, 10/01-2019)

Dalam penjelasan lainnya, kepala sekolah menerangkan dan menegaskan sebagai berikut:

“ Untuk keseluruhan dana BOS yang masuk pada SD Negeri Lung Manyo benar-benar dipergunakan paling utama untuk keperluan penunjang kegiatan belajar siswa yakni penyediaan media belajar siswa berupa buku-buku pelajaran dan alat tulis, selanjutnya untuk kreatifitas siswa dengan menambah kegiatan ekstra kurikuler berupa kegiatan pramuka dan kegiatan olah raga seperti bola kaki, tenis meja dan kesenian tari, sedangkan dana BOS yang tersisa selanjutnya diperuntukkan bagi perbaikan prasarana gedung sekolah”. (Kasek, 10/01-2019)

Hal yang senada juga disampaikan oleh pihak wakil kepala sekolah SD Negeri Lung Manyo yang menerangkan sebagai berikut:

“ Secara nyata dana BOS tahun Anggaran 2018 yang masuk pada sekolah SD Negeri Lung Manyo diperuntukkan secara nyata-nyata untuk sepenuhnya bagi kepentingan peningkatan belajar siswa, dimana mengedepankan penggunaan dana BOS untuk keperluan siswa secara nyata yakni pembelian buku pelajaran dan alat tulis belajar siswa dan kegiatan yang menunjang prestasi siswa diluar kegiatan belajar mengajar”. (Wakasek, 10/01-2019)

Hal sama juga disampaikan oleh bendahara sekolah SD Negeri Lung Manyo yang menerangkan bahwa:

“ dana BOS yang diterima pada Sekolah SD Negeri Lung Manyo secara nyata telah membebaskan seluruh siswa-siswi dari pembayaran biaya sekolah maupun pembelian buku-buku belajar dan alat tulis belajar”. (Bendahara, 10/01-2019)

Setelah dana BOS tersebut disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan sekolah pada SD Negeri Lung Manyo maka pihak sekolah juga tidak serta merta menggunakan dana BOS tersebut hanya berdasarkan kemauan dan kepentingan sekolah semata, akan tetapi semua kegiatan tersebut haruslah dilakukan dengan professional dan bertanggung jawab.

Keberadaan dana BOS sangat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran. Pemerintah telah memberikan subsidi kepada seluruh lembaga pendidikan tingkat SD/MI maupun SLTP/MTs untuk pembelian penyediaan buku pelajaran khususnya mata pelajaran utama yaitu bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris, dan IPA. Hal ini diungkapkan oleh kepala SD Negeri Lung Manyo bahwa:

“ Pengadaan buku bagi siswa merupakan hal sangat urgent dan sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar mereka, karena kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien jika semua siswa sudah memiliki buku pegangan.” (Kasek, 10/01-2019)

Hal senada juga disampaikan oleh bendahara SD Negeri Lung Manyo bahwa :

“ Sejak adanya dana bantuan BOS seluruh siswa tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan tugas belajar karena alasan ketiadaan buku pelajaran, sehingga siswa secara keseluruhan merasakan kesetaraan dalam menerima hasil pelajaran.” (Bendahara, 10/01-2019).

Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada Sekolah SD Negeri Lung Manyo diberikan pula kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan langganan daya dan jasa dimana pihak dari kepala sekolah memanfaatkan hal tersebut untuk keperluan pemasangan wireless network internet (jaringan internet) pada sekolah sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah sekolah:

“ Sejak adanya dana bantuan BOS pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo telah melakukan langganan jasa perangkat internat di sekolah yang bertujuan membuka informasi dan teknologi yang bersifat aktual dan mudah diperoleh oleh setiap siswa sekolah” (Kasek, 10/01-2019)

Sebagaimana ketentuan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018 telah diatur prosedur dan tata cara pertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Jika diamati dan disesuaikan dengan penggunaan dana BOS secara nyata pada SD Negeri Lung Manyo dengan ketentuan yang ada maka kegiatan tersebut secarannya nyata-nyata telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada lahirnya bantuan dana BOS tersebut.

Untuk pertanggung jawaban yang nyata haruslah kita cermati pula apakah pelaksanaan di sekolah tersebut dalam pertanggung jawabannya secara administrasi sudah tertib dalam pelaporan dan penggunaan dana BOS untuk setiap kegiatannya. Dimana pihak pengelola pertanggung jawaban dana BOS secara nyata pada sekolah SD Negeri Lung Manyo adalah kepala sekolah dan bendahara di mana dana tersebut oleh mereka lah dapat ditarik dan disalurkan kepada Sekolah SD Negeri Lung Manyo, sehingga sebagaimana diterangkan oleh kepala sekolah untuk seluruh kegiatan tersebut telah dipertanggung jawabkan secara tegas dan tidak menyalahi peraturan yang ada dengan membuat mekanisme administrasi pelaporan yang diterangkan sebagai berikut:

- 1) Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C),
- 2) Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2),
- 3) melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota,
- 4) memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada,
- 5) mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan,
- 6) mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Kepala Sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan komite sekolah (Formulir BOS-03),
- 7) mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04),
- 8) bertanggung jawab secara formal dan material atas pengguna hibah yang diterimanya,
- 9) membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7), laporan ini disimpan di Sekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- 10) melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6),
- 11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat,
- 12) memasang spanduk di Sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05),
- 13) bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana

BOS ke SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, 14) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS”

Untuk kelengkapan seluruh bentuk format formulir administrasi yang diajukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan penggunaan dan penyaluran dana BOS pada sekolah SD Negeri Lung Manyo dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh sekolah sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lung Manyo sebagai berikut.

“ Seluruh pembuatan administrasi pengelolaan dibuat secara teknis oleh bendahara pengeluaran sekolah sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis, selanjutnya saya selaku pimpinan sekolah melakukan koreksi kebenaran materiil isi laporan apakah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan disekolah, dan selanjutnya disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah sebelum disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten agar tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana BOS”. (Kasek, 10/01-2019)

Sebagaimana pertanggung jawaban merupakan tindakan akhir dalam pelaksanaan suatu pengelolaan dana BOS harus ditemukan titik kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan laporan pelaksanaan yang tertulis sehingga pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan tersebut seimbang (*balance*), hal mana tidak terlepas dari adanya persetujuan dan kesepakatan pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah baik sebagai pelaksana dan pengelola dan pengawas pengelolaan dana BOS pada sekolah SD Negeri Lung Manyo.

Selanjutnya pihak yang berada disisi pengawasan yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak sekolah, maupun peraturan pemerintah juga harus

melibatkan diri secara langsung dalam pengawasan pelaporan pertanggung jawaban dana BOS yang disampaikan oleh sekolah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah untuk proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo terhadap pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:

“ Bahwa saya selaku wakil kepala SD Negeri Lung Manyo dalam setiap pembuatan pelaporan kegiatan sekolah yang bersumber dari dana BOS selalu terlebih dahulu diberitahukan oleh kepala sekolah dan bendahara, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataan”.
(Wakasek, 10/01-2019)

Hal sama juga disampaikan oleh bendahara sekolah SD Negeri Lung Manyo yang menerangkan bahwa:

“ untuk pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, pihak dewan guru juga mendapatkan pemberitahuan dan pemaparan seluruh realisasi penggunaan dana BOS yang dilaporkan sehingga lebih terbuka”.
(Bendahara, 10/01-2019)

Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS atas kegiatan yang telah dilakukan, hal terpenting yang tidak boleh diabaikan oleh pihak bendahara sekolah adalah tertib administrasi dan pelaporan keuangan. Dimana bendahara sekolah pada SD Negeri Lung Manyo dalam melakukan proses pencatatan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan meliputi beberapa hal, yaitu dengan pembukuan, dengan syarat setiap transaksi harus dengan bukti yang sah, bukti pengeluaran yang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai, bukti pengeluaran harus jelas

uraiannya mengenai barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Kemudian seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat sesuai urutan tanggal, setiap akhir bulan tersebut ditutup dan dan dihitung saldonya untuk dicocokkan dengan saldo fisik baik yang ada di kas maupun bank.

Buku kas tidak boleh ada halaman kosong yang tidak teriasi atau tanda bekas coretan atau sesuatu catatan yang membuat interpretasi berbeda, hal ini sebagaimana diterangkan oleh petugas bendahara sekolah yang menerangkan bahwa:

“ untuk seluruh administrasi keuangan atas penggunaan dana BOS pada SD Negeri Lung Manyo telah disusun secara lengkap, tertata rapi, serta membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas”. (Bendahara, 10/02-2019)

Proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan dana BOS pada sekolah SD Negeri Lung Manyo mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah baik itu petunjuk teknis kegiatan maupun ketentuan lainnya dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari keuangan negara, sehingga dalam penggunaan dana yang bersumber dari pada keuangan negara tersebut tidak menimbulkan kerugian pada negara dan perekonomian negara yang dapat mengarah kepada terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

Untuk kegiatan tersebut sebagaimana keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Lung Manyo dalam penggunaan dana BOS mengacu kepada ketentuan yang diatur yang dijelaskan sebagai berikut:

“ Bahwa untuk pengelolaan dana BOS kita menggunakan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan untuk pembelian dan pengadaan barang dan jasa atau pembuatan rehab bangunan kita menggunakan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa dilingkup pemerintahan”. (Kasek, 10/01-2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bendahara SD Negeri Lung Manyo yang menjelaskan :

“ bahwa untuk kegiatan operasional langsung dengan siswa kita menggunakan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan untuk belanja barang dan pengadaan barang untuk keperluan sekolah kita menggunakan Kepres 54 tahun 2010 yang mengatur jumlah dan nominal keuangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan barang dan jasa, seperti contoh untuk kegiatan Rp.5.000.000,- harus dibuat kwitansi dan materai sedangkan diatas Rp.50.000.000,- harus dibuatkan surat perjanjian kerja (SPK)”. (Bendahara, 10/01-2019)

Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah belum bisa langsung cair sehingga untuk membantu pengelolaan sekolah pada tahap pertama, kepala sekolah maupun guru menalangi dengan uangnya sendiri. Sebagaimana penjelasan bendahara BOS SD Negeri Lung Manyo

“ dana BOS di sekolah selalu lancar, tetapi tahap pertama dana BOS belum bisa keluar meskipun RKAS sudah diajukan” (Bendahara, 10/01-2019).

Penjelasan tentang pencairan dana BOS juga ditegaskan oleh wakil kepala SD Negeri Lung Manyo, yaitu:

“ dana BOS di sekolah selalu berjalan lancar, namun untuk tahap pertama biasanya tidak cair secara lancar, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran kepala sekolah, guru, maupun TU menalangi terlebih dahulu.....” (Wakasek, 10/01-2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap wawancara dan observasi langsung ke Sekolah SD Negeri Lung Manyo diketahui bahwa

pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal pelaksanaan dilapangan dana BOS yang digunakan telah dirasakan langsung oleh para siswa–siswi pada SD Negeri Lung Manyo dengan menerima kegiatan belajar mengajar yang tidak dipungut biaya apapun oleh pihak sekolah dan mendapat pengembangan kegiatan kreatifitas diluar sekolah yang dapat menumbuhkan kualitas dan kemampuan siswa untuk berprestasi.

Selanjutnya dalam pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan Oleh pihak Kepala Sekolah dan Bendahara sebagai pengguna (user) tidak serta merta menggunakan untuk keperluan pribadi atau golongan saja tapi melibatkan seluruh komponen sekolah baik Dewan Guru dan Komite Sekolah dalam pelaporan pertanggung jawaban kegiatan dana BOS sehingga terjadinya keterbukaan (*transparance*) penggunaan dana BOS. Dimana bendahara sekolah telah melakukan pencatatan, pembukuan dan penertiban administrasi keuangan yang masuk dan keluar secara tertib dan rapi dalam buku Kas sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik itu petunjuk teknis dan peraturan pengadaan barang dan jasa serta keuangan negara, menunjukkan kegiatan tersebut dikelola secara arif dan bijaksana serta terhindar dari adanya kegiatan yang dapat mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi.

2. Efektivitas Pendayagunaan BOS dalam Pembiayaan Mutu Pendidikan Terkait 8 Standardi SD Swasta Lembah Jaya

Pendayagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Swasta Lembah Jaya sama halnya

dengan SD Negeri Lung Manyo tertera dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS sekolah, yang harus dibuat dipertengahan tahun atau pada saat menjelang pembelajaran tahun ajaran baru tahun berjalan dan anggarannya dibuat selama 1 tahun yang yang dialokasikan per program, per mata anggaran setiap triwulan dengan perhitungannya mengacu kepada jumlah peserta didik terbaru pada tahun ajaran berjalan yaitu sekitar bulan Juni. Berikut perhitungan anggaran SD Swasta Lembah Jaya yang diperuntukan anggaran 2018.

Dana yang diperoleh = jumlah peserta didik x anggaran dana BOS/siswa

$$= 101 \text{ anak} \times \text{Rp. } 800.000$$

$$= \text{Rp. } 80.800.000$$

Jumlah Anggaran = Rp. 16.160.000 + 32.320.000 + 16.160.000 +

$$16.160.000$$

$$= \text{Rp. } 80.800.000$$

Berikut penjelasan mengenai efektivitas program di SD Swasta Lembah Jaya untuk tahun anggaran 2018.

a. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi lulusan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu belanja cetak soal ujian dan belanja penggandaan. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Rincian Anggaran Pengembangan Kompetensi Lulusan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Kompetensi Lulusan	8.949.000				
Belanja cetak soal ujian	3.369.000	1.254.000	950.000	75.000	1.090.000
Belanja penggandaan	5.580.000	1.242.000	650.000	350.000	3.338.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan kompetensi lulusan yaitu sebesar Rp. 8.949.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk belanja cetak soal ujian dianggarkan sebesar Rp. 3.369.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.254.000, pada triwulan II sebesar Rp. 950.000, pada triwulan III sebesar Rp. 75.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 1.090.000. Untuk biaya belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 5.580.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.242.000, pada triwulan II sebesar Rp. 650.000, pada triwulan III sebesar Rp. 350.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 3.338.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Anggaran dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Swasta Lembah Jaya memberikan dampak positif pada sekolah

tersebut, dimana dengan adanya dana BOS tingkat kelulusan siswa dengan nilai terbaik mengalami peningkatan.(Nilai UASBN terlampir).

b.Efektivitas Pengembangan Standar Isi

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar isi dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu belanja makanan dan minuman harian pegawai dan belanja makan minum. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Isi

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Isi	2.150.000				
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.150.000	600.000	350.000	600.000	600.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar isi di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 2.150.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya belanja makanan dan minuman harian pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.150.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 600.000, pada triwulan II sebesar Rp. 350.000, pada triwulan III sebesar Rp. 600.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 600.000. Secara garis besar,

anggaran dana BOS untuk pengembangan standar isi terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Anggaran dana BOS untuk pengembangan standar isi di SD Swasta Lembah Jaya memberikan dampak yang positif pada sekolah tersebut, dengan adanya dana BOS tersebut sekolah dapat memiliki kurikulum K13.(SK Tim Kurikulum 2013).

SD Swasta Lembah Jaya sudah memiliki Kurikulum 2013

c.Efektivitas Pengembangan Standar Proses

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar proses dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering), belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan/bibit tanaman, belanja bahan kimia, belanja bahan/material lainnya, belanja papan pengumuman, belanja akomodasi dan belanja transportasi.

Tabel 4.11 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Proses

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar proses	16.327.000				
Belanja Alat Tulis Kantor	5.193.000	1.268.000	1.250.000	1.575.000	1.100.000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	150.000		150.000		

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	384.000	72.000	120.000	90.000	102.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	700.000	350.000		350.000	
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.275.000			1.275.000	
Belanja Bahan Kimia	405.000	220.000		185.000	
Belanja Bahan/Material Lainnya	220.000				220.000
Belanja Papan Pengumuman	350.000			350.000	
Belanja Akomodasi	550.000		550.000		
Belanja Transportasi	7.100.000	1.300.000	3.050.000	1.550.000	1.200.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar proses di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 16.327.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 5.193.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.268.000, pada triwulan II sebesar Rp. 1.250.000, pada triwulan III sebesar Rp. 1.575.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 1.100.000.

Untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) dianggarkan sebesar Rp. 150.000 dan terealisasi pada triwulan II. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dianggarkan

sebesar Rp. 384.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 72.000, pada triwulan II sebesar Rp. 120.000, pada triwulan III sebesar Rp. 90.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 102.000. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dianggarkan sebesar Rp. 700.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 350.000 dan pada triwulan III sebesar Rp. 350.000. Belanja bahan/bibit tanaman dianggarkan sebesar Rp. 1.275.000 dan terealisasi pada triwulan III. Belanja bahan kimia dianggarkan sebesar Rp. 405.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 220.000 dan pada triwulan III sebesar Rp. 185.000. Belanja bahan/material lainnya dianggarkan sebesar Rp. 220.000 dan terealisasi pada triwulan IV. Untuk belanja papan pengumuman dianggarkan sebesar Rp. 350.000 dan terealisasi pada triwulan III. Belanja akomodasi dianggarkan sebesar Rp. 550.000 dan terealisasi pada triwulan II. Belanja transportasi dianggarkan sebesar Rp. 7.100.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.300.000, pada triwulan II sebesar Rp. 3.050.000, pada triwulan III sebesar Rp. 1.550.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 1.200.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar proses terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan standar proses, perubahan yang terjadi di SD Swasta Lembah Jaya yaitu salah seorang guru telah memiliki Prota, Promes, RPP dan penilaian K-13 mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI (SK Pembagian Tugas Terlampir). 50% BOS dapat digunakan untuk gaji guru.

d.Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu biaya belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja bimbingan teknis. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Rincian Anggaran Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.230.000				
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	4.400.000	1.150.000	900.000	1.750.000	600.000
Belanja Sosialisasi	350.000	350.000			
Belanja Bimbingan Teknis	1.480.000	880.000	600.000		

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 6.230.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya belanja kursus-kursus singkat/pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 4.400.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 1.150.000, pada triwulan II sebesar Rp. 900.000, pada

triwulan III sebesar Rp. 1.750.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 600.000. Untuk belanja sosialisasi dianggarkan sebesar Rp. 350.000 dan terealisasi pada triwulan I. Belanja bimbingan teknis dianggarkan sebesar Rp. 1.480.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 880.000 dan pada triwulan II sebesar Rp. 600.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Swasta Lembah Jaya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat meningkat. Guru dan Kepala sekolah selalu mengikuti pelatihan meningkatkan mutu.

e.Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan sarana dan prasarana dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu belanja peralatan dapur, belanja jasa service dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

Tabel 4.13 Rincian Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	1.164.000				
Belanja peralatan dapur	250.000	250.000			
Belanja jasa service	200.000			200.000	
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	714.000	364.000		350.000	

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 1.164.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya belanja peralatan dapur dianggarkan sebesar Rp. 250.000 dan terealisasi pada triwulan I. Belanja jasa service dianggarkan sebesar Rp. 200.000 dan terealisasi pada triwulan III. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp. 714.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 364.000 dan pada triwulan III sebesar Rp. 350.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana di SD Swasta Lembah Jaya berdampak pada penambahan sarana dan prasarana di sekolah, yaitu pembelian meja dan kursi kelas II sebanyak dua buah, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada siswa dalam belajar. Sudah adanya printer cannon IP 2770 untuk keperluan sekolah.

f. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS, standar pengelolaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu biaya cetak dan foto copy. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pengelolaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Pengelolaan	630.000				
Belanja Makan Minum pada ujian nasional	630.000		630.000		

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 630.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya belanja makanan dan minuman pada ujian nasional dianggarkan sebesar Rp. 630.000 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 600.000. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Dengan terealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan adanya SK Tim dana BOS dan SK pembagian tugas untuk setiap guru di lingkungan SD Swasta Lembah Jaya. (Struktur Guru sesuai dengan tugas terlampir).

g.Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan standar pembiayaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dan mendetail di RKAS SD Swasta Lembah Jaya

yaitu honor pegawai honorer/ tidak tetap, belanja honorarium pengelola dana BOS, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet, belanja upah dan belanja pemenang lomba. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pembiayaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan Standar Pembiayaan	29.190.000				
Honor Pegawai Honorer / Tidak Tetap	23.400.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	2.640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Belanja Listrik	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Belanja Upah	400.000	200.000		200.000	
Belanja Pemenang Lomba	950.000				950.000

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 29.190.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk honor pegawai honorer/ tidak tetap dianggarkan sebesar Rp. 23.400.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 5.850.000, pada triwulan II sebesar Rp. 5.850.000, pada triwulan III sebesar Rp. 5.850.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp.

5.850.000. Belanja honorarium pengelola dana BOS dianggarkan sebesar Rp. 2.640.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 660.000, pada triwulan II sebesar Rp. 660.000, pada triwulan III sebesar Rp. 660.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp. 660.000. Belanja listrik dianggarkan sebesar Rp. 600.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp.150.000, pada triwulan II sebesar Rp.150.000, pada triwulan III sebesar Rp.150.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp.150.000. Belanja kawat/faksimili/internet dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp.300.000, pada triwulan II sebesar Rp.300.000, pada triwulan III sebesar Rp.300.000 dan pada triwulan IV sebesar Rp.300.000. Belanja upah dianggarkan sebesar Rp. 400.000 dan terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 200.000 dan pada triwulan III sebesar Rp. 200.000. Belanja pemenang lomba dianggarkan sebesar Rp. 950.000 dan terealisasi pada triwulan IV. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.

Anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan di SD Swasta Lembah Jaya memberikan dampak positif bagi sekolah, dimana dengan adanya dana BOS tersebut pihak sekolah dapat membuat laporan SPJ, buku kas umum, K1, K2, K3 sampai K7 dan K7A serta adanya laporan untuk pembayaran listrik.(RKAS terlampir).

h.Efektivitas Pengembangan Perpustakaan

Sesuai dengan petunjuk pemanfaatan, dana BOS dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Swasta Lembah Jaya yaitu pengadaan buku teks siswa dan pengadaan buku pegangan guru. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16 Rincian Anggaran Pengembangan Perpustakaan

Uraian	Jumlah (dalam Rp)	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
Pengembangan perpustakaan	16.160.000				
Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	14.810.000		14.810.000		
Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	1.350.000		1.350.000		

Sumber: Data diolah tahun 2019.

Dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dapat peneliti simpulkan adanya efektivitas pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan di SD Swasta Lembah Jaya. Dana yang dianggarkan untuk pengembangan perpustakaan yaitu sebesar Rp. 16.160.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, dimana untuk biaya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum dianggarkan sebesar Rp. 14.810.000 dan terealisasi pada triwulan II. Pengadaan buku matematika & pengetahuan alam dianggarkan sebesar Rp. 1.350.000 dan terealisasi pada triwulan II. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan terealisasi secara efektif di SD Swasta Lembah Jaya.(SK petugas Pustaka)

Anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan di SD Swasta Lembah Jaya memberikan perubahan positif yaitu tersedianya buku K-13 untuk setiap siswa dan ruang perpustakaan dapat dibenahi, serta penambahan buku-buku di ruang perpustakaan.(SK Pustaka terlampir).SD Swasta Lembah Jaya sudah memiliki ruang pustaka.

Realisasi anggaran tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara yang menangani dana BOS. Berdasarkan wawancara peneliti, proses perencanaan anggaran dana BOS diawali dengan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), adapun tahapannya sebagai berikut:

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing komponen Standar Nasional Pendidikan yang diperlukan sekolah yang disusun oleh kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Sebagaimana penjelasan kepala SD Swasta Lembah Jaya sebagai berikut:

“ ... Yang terlibat dalam proses penyusunan rencana anggaran dana BOS yaitu kepala sekolah, guru, dan komite sekolah”.
(Kepsek, 11/01-2019)

Proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh beberapa pihak yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru. Dari berbagai pihak yang ikut serta dalam rapat yaitu semua pihak yang ada pada sekolah baik dari guru, kepala sekolah, maupun komite sekolah yang

berasal dari luar sekolah adalah orang yang berasal dari pihak luar sekolah, semua orang tua peserta didik tahun ajaran baru. Jadi semua peserta rapat yang hadir dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yaitu terdiri dari beberapa pihak dari sekolah yaitu, guru, kepala sekolah, dan bagian administrasi. Sedangkan dari pihak dari luar sekolah yaitu komite, orang tua peserta didik baru, dan pengurus yang bersangkutan.

Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah tersusun, bendahara mengajukan lagi kepada kepala sekolah untuk diteliti lebih lanjut, dan setelah semuanya tersusun rapi, kepala sekolah mengajukan kepada komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan kepala sekolah bersama bendahara BOS membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan kepada kepala sekolah, wali murid, guru, dan komite, dan pengurus melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan. Sebagaimana penjelasan bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya:

“ Setelah RKAS dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah, kemudian sekolah mengadakan musyawarah lagi kepada wali murid, guru, komite, kepala sekolah, dan pihak yang terkait untuk membahas rencana pembelanjaan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan dana BOS.....”. (Bendahara, 11/01-2019)

Untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Swasta Lembah Jaya menjabarkan sumber dana yang diperoleh dari

pemerintah, yaitu dana BOS. Untuk penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah. Bukti SD Swasta Lembah Jaya menggunakan dana sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, pada saat rapat untuk penyusunan, sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat aturan-aturan penggunaan dana BOS dan larangannya. Hal ini dijelaskan oleh bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya, yaitu:

“ Penggunaan dana BOS di sekolah ini digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan digunakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah tahun 2018.....”. (Bendahara, 11/01-2019)

Proses perencanaan pembiayaan dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya, perencanaan pembiayaannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan diterapkan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Sebagaimana penjelasan kepala SD Swasta Lembah Jaya:

“ Penggunaan dana BOS di sekolah digunakan sesuai RKAM, dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah, dan diterapkan ke dalam 8 Standar Nasional pendidikan (SNP),.....” (Kepsek, 11/01-2019).

Dana BOS yang diterima SD Swasta Lembah Jaya Rp 800.000/siswa/tahun. Sedangkan jumlah siswa di SD Swasta Lembah Jaya

adalah 101, jadi jumlah total dana yang diterima sekolah adalah Rp 80.800.000, sebagaimana penuturan bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya:

“ bahwa keseluruhan dana BOS yang diterima SD Swasta Lembah Jaya digunakan sesuai aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah. Dari keseluruhan dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan Standar Nasional Pendidikan” (Bendahara, 11/01-2019)

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari semua dana BOS yang digunakan semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan itu semua dana yang diterima sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di SD Swasta Lembah Jaya. Dengan adanya dana BOS digunakan ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan proses belajar mengajar yang ada di SD Swasta Lembah Jaya terbantu, karena kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dalam berbagai kegiatan, meskipun ada satu dua yang tidak sesuai aturan, kini bisa menjadi evaluasi untuk pembuatan RKAS yang selanjutnya.

Setelah perencanaan pembiayaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan terealisasi sesuai rencana, langkah selanjutnya dalam yaitu pelaksanaan pembiayaan. Dalam pelaksanaan dana BOS SD Swasta Lembah Jaya melakukan dua tahap yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari dua tahap tersebut dikembangkan menjadi beberapa bagian, adapun kegiatannya diawali dari tahap penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pembelanjaan dana BOS.

Untuk penyaluran dana BOS, sekolah menerima setiap tri wulan (empat tahap) dalam satu tahun sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari sekolah. Sebagaimana penjelasan kepala SD Swasta Lembah Jaya sebagai berikut:

” Sekolah menerima dana BOS setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), dan sesuai petunjuk teknis BOS pada sekolah” (Kepsek, 11/01-2019).

Pada tahap pertama dalam pencairan dana BOS, dana BOS belum bisa langsung cair sehingga untuk membantu pengelolaan sekolah pada tahap pertama, kepala sekolah maupun guru menalangi dengan uangnya sendiri. Karena dana BOS pada tahap pertama biasanya cair pada tahap kedua biasanya di bulan April, namun untuk tahap kedua sampai akhir dana selalu cair tepat waktu sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sebagaimana penjelasan bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya:

“ Untuk pencairan dana BOS di sekolah selalu lancar, tapi untuk tahapan pertama biasanya di bulan Januari sampai Maret dana BOS belum bisa keluar meskipun RKAS sudah diajukan.....” (Bendahara, 11/01-2019).

Penjelasan tentang pencairan dana BOS juga ditegaskan oleh wakil kepala SD Swasta Lembah Jaya, yaitu:

“ Pencairan dana BOS di sekolah selalu berjalan lancar, hanya saja untuk bulan Januari-Maret atau pada tahap pertama biasanya tidak cair secara lancar, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran kepala sekolah, guru, maupun TU menalangi terlebih dahulu.....” (Wakasek, 11/01-2019)

Pencairan dana BOS ke sekolah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening sekolah. Sebagaimana penjelasan bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya sebagai berikut:

“ Sekolah menyusun anggaran dalam bentuk RKAS kemudian diajukan, setelah disetujui dana BOS bisa cair, untuk bukti atau kuitansi sudah tertera dalam laporan pertanggungjawaban” (Bendahara, 11/01-2019)

Jadi penjelasan tentang penyaluran dana BOS pada SD Swasta Lembah Jaya bahwasanya sekolah menerima dana BOS setiap tri wulan (empat tahap) dalam satu tahun, sesuai dengan pengajuan RKAS. Untuk Pencairan dana BOS ke sekolah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening sekolah. Penjelasan ini diperoleh dari wawancara kepada kepala sekolah, bendahara BOS, dan wakil kepala sekolah.

Pengambilan dana BOS SD Swasta Lembah Jaya diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan, dengan aturan dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akan dilaksanakan di sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala SD Swasta Lembah Jaya sebagai berikut:

“ Pengambilan dana diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan sekolah, diambil sesuai aturan dan sesuai RKAS”. (Kepsek, 11/01-2019).

Untuk proses pengambilan dana BOS bisa dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan dana tersebut, untuk pengambilan dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya biasanya dilakukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan, biasanya dengan cara panitia penyelenggara mengajukan proposal kegiatan kepada bendahara BOS, untuk meminta dana yang dibutuhkan pada kegiatan, setelah proposal ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS, kemudian bendahara memberi dana tersebut

namun kuitansi pembelian dikasihkan kembali kepada bendahara BOS untuk laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana penjelasan bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya, yaitu:

“ Dana BOS bisa digunakan semua pihak yang ada di sekolah, namun untuk penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tidak asal-asalan, untuk pembelanjaan harus dibuktikan dengan kuitansi yang nantinya dikasihkan oleh bendahara untuk laporan pertanggungjawaban.....” (Bendahara, 11/01-2019).

Dari penjelasan di atas, bahwasanya untuk pengambilan dana BOS yaitu dana BOS diambil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terutama untuk keperluan proses belajar mengajar, pengambilan juga tidak asal-asalan yaitu sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan BOS pada sekolah. Sedangkan untuk pengambilan dana BOS setelah dana BOS cair bisa digunakan semua pihak yang ada di sekolah, dengan syarat digunakan sesuai aturan dana BOS. Di sekolah untuk pembelian biasanya dengan mengajukan proposal yang sudah disetujui kepala sekolah, untuk bukti bahwa dana tersebut digunakan sesuai yang diperlukan yaitu dengan memberikan kuitansi hasil pembelanjaan kepada bendahara BOS sebagai laporan pertanggungjawaban dana BOS setiap 3 bulan sekali.

Untuk penggunaan dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional sekolah yaitu sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah. Proses penggunaan dana BOS digunakan sesuai dengan aturan yang ada dan yang terealisasi dalam RKAS yang telah disusun sebelumnya. Dalam RKAS yang telah tersusun bahwa dana yang ada di sekolah digunakan untuk pembelanjaan

yang berkaitan ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan, dari keseluruhan dana yang diterima oleh sekolah semuanya terserap 100%, dapat dikategorikan efektif, karena dapat menggunakan dana BOS dengan semaksimal mungkin untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.

Untuk penggunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Swasta Lembah Jaya yaitu penggunaannya sangat maksimal, tepat pada sasaran dan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada sekolah. Adapun dana dalam pembiayaan mutu pendidikan yang ada di sekolah sangat membantu dan mendukung sekali dalam proses pembelajaran, karena dana BOS merupakan satu-satunya sumber dalam pengelolaan sekolah. Sebagaimana dijelaskan kepala SD Swasta Lembah Jaya sebagai berikut:

“ Dana BOS sangat membantu sekali dalam pembiayaan mutu pendidikan, karena dana BOS satu-satunya sumber dalam pengelolaan sekolah.....” (Kepsek, 11/01-2019).

Adapun untuk pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya selama menerima dana BOS sampai saat ini tidak terdapat kendala yang besar, karena dana yang diterima sekolah selalu lancar sesuai dengan jadwalnya, meskipun untuk tahap pertama dana BOS belum tentu langsung cair, namun masih bisa diatasi. Sedangkan untuk mengkomunikasikan tentang adanya dana BOS kepada orang tua, komite sekolah dan instansi terkait dana BOS mulai perencanaan sampai evaluasinya, sekolah memusyawarakannya setiap ajaran baru dan

sekalian menentukan RAPBS yang akan dilaksanakan di sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh bendahara BOS SD Swasta Lembah Jaya berikut ini:

“ Untuk mengkomunikasikan tentang adanya dana BOS pada sekolah pada orang tua, komite, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan sekolah yaitu, rapat setiap ada tahun ajaran baru, yang didalamnya membahas RAPBS yang menggunakan dana BOS.....” (Bendahara, 11/01-2019).

Dari penjelasan di atas bahwasanya penggunaan dana BOS hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional sekolah, dengan adanya dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya sangat membantu sekali untuk pembiayaan mutu pendidikan, dengan adanya dana BOS, sekolah semakin berkembang lebih baik hal ini dibuktikan dengan prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun akademik.

Untuk pembelanjaan dana BOS yaitu berupa barang dan jasa, pembelanjaan barang atau jasa tidak dilakukan dengan asal namun disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan yaitu, sesuai dengan RKAS yang sudah disetujui oleh kepala sekolah dan komite. Untuk mekanisme pembelanjaan barang atau jasa di SD Swasta Lembah Jaya yaitu dengan proses perencanaan pembiayaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Swasta Lembah Jaya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh komponen sekolah, guru, dan pegawai administrasi, kemudian dimusyawarahkan untuk diajukan kepada kepala sekolah dan komite setelah pengajuan kebutuhan tersebut disetujui dibuktikan dengan kuitansi. Apabila pembelajaran barang yang dibutuhkan

cukup besar yaitu menggunakan sistem perbandingan harga, yaitu minimal membandingkan 3 toko atau dengan sistem lelang.

Barang yang sudah dibelanjakan kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, untuk proses penggunaannya digunakan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun sumber pembiayaan di SD Swasta Lembah Jaya hanya bersumber dari dana BOS.

Dari penjelasan di atas bahwasanya untuk pembelanjaan barang atau jasa yang diperlukan oleh sekolah digunakan untuk pembelanjaan barang dan jasa disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan sesuai dengan aturan petunjuk teknis dana BOS, apabila pembelanjaan barang yang dibutuhkan cukup besar yaitu menggunakan sistem perbandingan harga, yaitu minimal membandingkan 3 toko atau dengan sistem lelang. Untuk penggunaannya digunakan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, sehingga membantu meningkatkan mutu pendidikan karena semua kebutuhan yang diperlukan bisa terpenuhi walaupun belum bisa maksimal. Adapun sumber pembiayaan yang ada di sekolah hanya bersumber dari dana BOS.

Dari perencanaan yang telah dianggarkan pada RKAS yang telah disusun untuk 1 tahun, setiap tiga bulan (empat tahap) dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk pengeluaran yang telah terealisasi hampir 100% digunakan secara maksimal karena dalam penggunaan dana BOS harus digunakan sesuai aturan yang berlaku, jika ada uang sisa pada akhir laporan

pertanggungjawaban uang tersebut harus dikembalikan, intinya bantuan dana BOS yang diberikan pemerintah sebisa mungkin habis, dengan jumlah total hasil laporan nol.

C. Pembahasan

Pada dasarnya, BOS berkenaan dengan pendanaan pendidikan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini artinya bahwa sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (orangtua siswa). Terkait dengan hal tersebut, sekolah dapat menerima bantuan berupa uang untuk keperluan untuk penyelenggaraan pendidikan. Fattah (2012: 25) mengemukakan bahwa untuk membiayai proses pendidikan khususnya untuk belanja pendidikan sebagaimana yang disebut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sumber dana diperoleh dari pemerintah dan orang tua.

Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Menurut Dirjen Mandikdasmen (2009) melalui program BOS yang terkait pendidikan, pengelolaannya memperhatikan hal berikut 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun; 2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena

tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; 3) Anak lulusan sekolah tingkat SMK/SMA, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya kesekolah setingkat tinggi.

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya menurut keterangan kepala sekolah dan hasil wawancara yang didukung dengan RKAS, pada dasarnya telah berjalan dengan efektif. Kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juknis yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut.

Pendayagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya tertera dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS sekolah, yang harus dibuat dipertengahan tahun atau pada saat menjelang pembelajaran tahun ajaran baru tahun berjalan dan anggarannya dibuat selama 1 tahun yang dialokasikan per program, per mata anggaran setiap triwulan dengan

perhitungannya mengacu kepada jumlah peserta didik terbaru pada tahun ajaran berjalan yaitu sekitar bulan Juni.

Mekanisme anggaran yang ada ialah anggaran tahun 2018 dibuat dan disahkan oleh tim manajemen kabupaten/kota pada bulan Juni 2017 (periode anggaran tahun pembelajaran Juli 2017-Juni 2018). Namun dibulan Desember 2018 terjadi revisi anggaran perubahan disesuaikan dengan Juknis Bos terbaru tahun 2018 dimana biasanya komponen anggaran akan berubah naik. Rencana Anggaran tersebut juga dimintakan pengesahan ke tim manajemen kabupaten/kota. Disamping itu dimungkinkan juga pada setiap triwulan ada perubahan anggaran.

Dana BOS cair sesuai juknis BOS yaitu setiap bulan awal periode triwulan sedangkan realisasi dana BOS dibuat setiap akhir triwulan berjalan yaitu: realisasi anggaran triwulan 1 laporan cair pada bulan Januari laporan realisasi bulan April, realisasi anggaran triwulan 2 yang cair pada bulan April dan laporan realisasi bulan Juli, realisasi anggaran triwulan 3 yang cair pada bulan Juli dan laporan realisasi bulan Agustus, realisasi anggaran triwulan 4 yang cair pada bulan Oktober dan laporan realisasi pada bulan Januari 2019.

SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya telah melakukan rincian untuk berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua sekolah ini juga telah memilah kegiatan yang akan terealisasi. Kegiatan yang terealisasi akan disesuaikan dengan tingkat keefektivitas di sekolah. Program yang terealisasi di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya sesuai dengan persetujuan tim manajemen BOS kabupaten/kota. Apabila telah disetujui, maka sekolah segera melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif.

Penggunaan dana BOS menurut Juknis 2018 dapat digunakan untuk 8 jenis komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS, yaitu: pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan peserta didik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan pengembangan perpustakaan.

Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mobeler sekolah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji komponen pembiayaan dana BOS sesuai dengan yang tertera dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

Efektivitas dana BOS yang dibedakan menjadi 8 program tersebut dalam setiap triwulan berbeda dalam penggunaan dana untuk kelancaran program-program yang telah dibuat. Program-program kegiatan yang dibuat disesuaikan dengan peraturan pemerintah, sekolah hanya menjalankan prosedur menurut aturan. Persentase keefektifitan program kegiatan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya terbilang berjalan efektif sesuai dengan rencana dan terbukti dari hasil realisasi.

1. Efektivitas Pengembangan Kompetensi Lulusan

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi lulusan dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD

Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya, terlihat bahwa dana BOS yang dianggarkan untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Negeri Lung Manyo yaitu sebesar Rp. 7.856.000 dan semuanya terealisasi dengan efektif dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan hasil pengamatan peneliti di SD SD Swasta Lembah Jaya, terlihat bahwa dana BOS yang dianggarkan untuk pengembangan kompetensi lulusan di SD Swasta Lembah Jaya yaitu sebesar Rp. 8.949.000 dan semuanya terealisasi dengan efektif dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan kompetensi lulusan terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

2. Efektivitas Pengembangan Standar Isi

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan standar isi dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 1.200.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada BOS tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar isi yaitu sebesar Rp. 2.150.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada BOS tersisa. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar isi

teralisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

3. Efektivitas Pengembangan Standar Proses

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan standar proses dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar proses yaitu sebesar Rp. 25.470.499 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar proses yaitu sebesar Rp. 16.327.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS tersisa. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar proses terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

4. Efektivitas Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 7.615.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di

SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu sebesar Rp. 6.230.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo.

5. Efektivitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana dan prasarana dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan sarana dan prasarana yaitu sebesar Rp. 22.287.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan sarana dan prasarana yaitu sebesar Rp. 1.164.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

6. Efektivitas Pengembangan Standar Pengelolaan

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan standar pengelolaan dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD

Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar pengelolaan yaitu sebesar Rp. 1.406.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar pengelolaan yaitu sebesar Rp. 630.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pengelolaan terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

7. Efektivitas Pengembangan Standar Pembiayaan

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan standar pembiayaan dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar pembiayaan yaitu sebesar Rp. 19.285.501 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan standar pembiayaan yaitu sebesar Rp. 29.190.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara keseluruhan, anggaran dana BOS untuk pengembangan standar pembiayaan terealisasi secara efektif dalam

pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

8. Efektivitas Pengembangan Perpustakaan

Dana BOS yang dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan dijabarkan secara terperinci dalam RKAS SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya. Dari hasil pengamatan peneliti di SD Negeri Lung Manyo, dana yang dianggarkan untuk pengembangan perpustakaan yaitu sebesar Rp. 21.280.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Demikian juga dengan SD Swasta Lembah Jaya, dari hasil pengamatan peneliti di SD Swasta Lembah Jaya, dana yang dianggarkan untuk pengembangan perpustakaan yaitu sebesar Rp. 16.160.000 dan semuanya terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa. Secara garis besar, anggaran dana BOS untuk pengembangan perpustakaan terealisasi secara efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

Kegiatan pendayagunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya disusun berdasarkan aturan yang berlaku, yang disusun oleh beberapa pihak yang ada di sekolah, sedangkan untuk tahapan perencanaan meliputi kegiatan perencanaan anggaran (RKAS), mempersiapkan anggaran yang dibahas pada saat rapat perencanaan dengan wali murid, kepala sekolah, guru dan komite pada awal tahun ajaran baru, setelah perencanaan dalam RKAS sudah disusun kemudian anggaran dikelola dalam bentuk Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja

Sekolah (RAPBS), dan yang terakhir menilai perencanaan dana BOS sesuai dengan aturan penggunaan dan larangannya, dari dana BOS yang diterima sekolah secara keseluruhan terserap 100%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lipham (dalam Mulyasa, 2011:199) bahwa empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran berikut: perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh ahli tersebut sudah sesuai apa yang terjadi di lapangan. Dari perencanaan pembiayaan dana BOS yaitu perencanaan RKAS, dalam mempersiapkan juga sudah direncanakan dalam RKAS, untuk mengelola pelaksanaan biaya yaitu dengan RAPBS dan mempersiapkan dana yang diterima dan hasil yang telah dikeluarkan, penilaian pelaksanaan anggaran di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan dalam laporan pertanggungjawaban.

Jadi secara umum tahap perencanaan pembiayaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya sesuai aturan petunjuk teknis dan digunakan 8 Standar Nasional Pendidikan dari dana yang diterima sekolah untuk kegiatan 8 standar tersebut terserap 100%.

Setelah perencanaan pembiayaan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan RKAS, langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan. Pada tahap ini, ada dua tahap pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran, dalam penerimaan tersebut pertama untuk

penyaluran yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah kepada sekolah dengan syarat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Pengambilan dana BOS bisa diambil oleh semua pihak yang ada di sekolah. Untuk pengambilan disesuaikan untuk keperluan yang dibutuhkan dan sesuai peraturan petunjuk teknis. Pembelanjaan dana BOS dibelanjakan untuk barang dan jasa biaya operasional sekolah sesuai aturan petunjuk teknis, untuk pembelanjaan dengan harga yang relatif tinggi yaitu dengan membandingkan minimal 3 toko agar tidak terjadi pemborosan, untuk proses belajar mengajar sangat terbantu sehingga meningkatkan mutu proses pembelajaran peserta didik, karena terpenuhi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam Mulyasa (2011: 201) bahwa dalam pelaksanaan keuangan terdiri dari dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan.

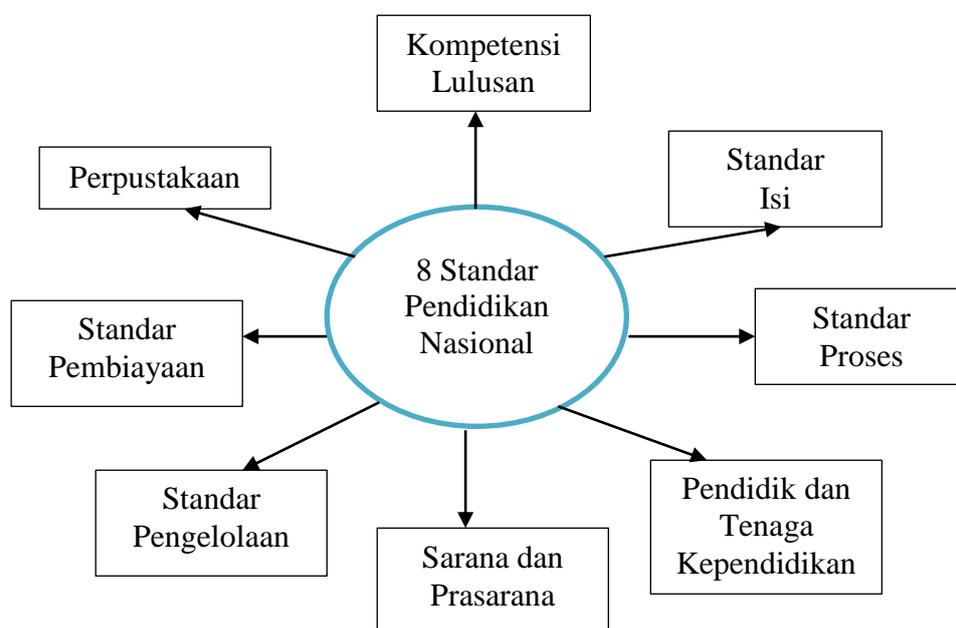
Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Mulyasa di atas, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena dalam pelaksanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu, petunjuk teknis

penggunaan dana BOS pada tahun 2018. Dengan adanya dana BOS yang ada di sekolah sangat membantu memaksimalkan mutu proses pembelajaran, selain dana BOS yang membantu meningkatkan pendidikan pembelajaran yaitu adanya (guru, siswa, kurikulum, uang dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hanifah dan Suhana (2012: 84) bahwa sesuai dengan yang terjadi di lapangan, mutu pendidikan dapat berhasil maksimal jika didukung oleh beberapa komponen salah satunya yaitu dengan biaya, dengan adanya biaya dapat memaksimalkan mutu pendidikan sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dan harmonis karena terbantu oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan adanya proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dana BOS yang digunakan secara maksimal untuk kebutuhan sekolah, sekolah kini sangat terbantu salah satunya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dijelaskan dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, untuk standar proses yang dijelaskan pada bab IV pasal 19 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Jadi secara umum pendayagunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya berjalan sesuai rencana dan digunakan untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran. Hal ini diuraikan dengan rincian pelaksanaan pada 8 Standar Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh sekolah untuk penggunaan yang semaksimal mungkin untuk menunjang keberhasilan kualitas sekolah, salah satunya yaitu dengan penggunaan dana BOS yang dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berikut ini merupakan alur 8 standar pendidikan nasional yang diwajibkan dalam penggunaan anggaran dana BOS, yaitu:



Gambar 4.1 Alur 8 Standar Pendidikan Nasional

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya evaluasi dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan. Dalam tahap evaluasi dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak internal

dan pihak eksternal yaitu pihak tim manajemen BOS kabupaten. Jadi dalam evaluasi pembiayaan dana BOS yang dilaksanakan di sekolah tidak boleh dilakukan oleh orang sembarang, untuk lembaran monitoring juga tidak diberikan kepada sekolah yaitu, langsung diambil lagi oleh pihak pengawas. Hasil dari evaluasi dan pengawasan yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat sekolah setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun. Dengan demikian evaluasi penggunaannya BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dalam tahap evaluasi dalam pelaporan keuangan dana BOS yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, pihak sekolah sudah memberikan laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan disertai kuitansi.

Jadi secara umum evaluasi dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya dilaksanakan sesuai aturan, yaitu pada tahap evaluasi atau laporan pertanggungjawaban untuk sebelumnya sekolah sudah mengirimkan RKAS kemudian untuk tiga bulan selanjutnya pada laporan pertanggungjawaban sekolah. Dengan adanya pendayagunaan dana BOS yang diterima sekolah sangat membantu dalam meningkatkan mutu mutu pendidikan karena membantu meningkatkan prestasi peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah baik akademik maupun non akademik.

Dari uraian dan penjelasan tentang pendayagunaan dana BOS di SD Negeri Lung Manyo di atas, peneliti merangkum rincian anggaran ditinjau dari delapan aspek Standar Nasional Pendidikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17 Rincian dan Realisasi Program BOS SD Negeri Lung Manyo

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pengembangan kompetensi lulusan	7.856.000	7.856.000	100%
2	Pengembangan standar isi	1.200.000	1.200.000	100%
3	pengembangan standar proses	25.470.499	25.470.499	100%
4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	7.615.000	7.615.000	100%
5	Pengembangan sarana dan prasarana	22.287.000	22.287.000	100%
6	Pengembangan standar pengelolaan	1.406.000	1.406.000	100%
7	Pengembangan standar pembiayaan	19.285.501	19.285.501	100%
8	Pengembangan perpustakaan	21.280.000	21.280.000	100%
Total		106.400.000	106.400.000	100%

Hasil realisasi Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa dari total dana BOS yang diterima oleh SD Negeri Lung Manyo, baik dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berjumlah Rp. 106.400.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, disertai dengan perincian penggunaan anggaran untuk setiap komponen yang digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan dana BOS di SD Negeri Lung Manyo efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, karena telah terealisasi dengan baik dan telah sesuai dengan juknis BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari semua dana BOS yang digunakan semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan itu

semua dana yang diterima sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo.

Kemudian, dari uraian dan penjelasan tentang pendayagunaan dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya di atas, peneliti merangkum rincian anggaran ditinjau dari delapan aspek Standar Nasional Pendidikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18 Rincian dan Realisasi Program BOS SD Swasta Lembah Jaya

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pengembangan kompetensi lulusan	8.949.000	8.949.000	100%
2	Pengembangan standar isi	2.150.000	2.150.000	100%
3	pengembangan standar proses	16.327.000	16.327.000	100%
4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	6.230.000	6.230.000	100%
5	Pengembangan sarana dan prasarana	1.164.000	1.164.000	100%
6	Pengembangan standar pengelolaan	630.000	630.000	100%
7	Pengembangan standar pembiayaan	29.190.000	29.190.000	100%
8	Pengembangan perpustakaan	16.160.000	16.160.000	100%
Total		80.800.000	80.800.000	100%

Hasil realisasi Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS) yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa dari total dana BOS yang diterima oleh SD Swasta Lembah Jaya, baik dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berjumlah Rp. 80.800.000 dan semuanya terealisasi dengan baik, disertai dengan perincian penggunaan anggaran untuk setiap komponen yang digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan dana BOS di SD Swasta Lembah Jaya efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, karena telah terealisasi dengan baik dan telah sesuai dengan juknis BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana

BOS digunakan untuk kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari semua dana BOS yang digunakan semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan itu semua dana yang diterima sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di SD Swasta Lembah Jaya.

Realisasi anggaran tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara yang menangani dana BOS. Program dana BOS ini sudah dirasakan oleh pihak sekolah pada SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya.

Berdasarkan berbagai fakta yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendayagunaan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan sudah dapat mewujudkan tujuan utama dari Pengelolaan Dana BOS yaitu Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihasilkan telah tepat sasaran, peningkatan kompetensi murid dan kualitas belajar dan bertambahnya tenaga pendidik dalam membantu kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan dana BOS dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Dimana kebutuhan barang dilakukan dengan melihat kebutuhan sekolah.

Walaupun seluruh dana BOS yang diterima oleh pihak SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya sudah terealisasi dengan baik dan efektif, namun ada kendala yang dihadapi oleh kedua sekolah tersebut dalam pengelolaan dana BOS untuk pembiayaan mutu pendidikan. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu karena dana BOS pada tahap pertama selalu

terlambat walaupun RKAS sudah diajukan. Keterlambatan dana BOS pada tahap pertama ini bukan menjadi penghalang bagi kedua sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan yang telah direncanakan, karena meskipun tahap pertama pencairan dana BOS selalu terlambat, namun pada tahap berikutnya selalu tepat.

Berdasarkan uraian tersebut maka program dan bantuan operasional sekolah di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya dianggap mencapai target yang diharapkan. Namun, pihak sekolah beranggapan bahwa target-target tersebut terpenuhi bukan berarti membuat pelaksana program berbangga diri. Kebijakan bantuan operasional sekolah akan lebih dimanfaatkan secara selektif dan produktif melebihi target yang telah tercapai. Penerapan itu akan membantu sekolah menjadi lebih unggul dan berkompeten mencetak lulusan yang siap bersaing dan inovatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Lung Manyo efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, hal ini sesuai dengan program pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan peserta didik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan pengembangan perpustakaan. Seluruh program pembiayaan tersebut terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa.
2. Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Swasta Lembah Jaya efektif dalam pembiayaan mutu pendidikan, hal ini juga sesuai dengan program pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan peserta didik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan pengembangan perpustakaan. Seluruh program

pembiayaan tersebut terealisasi dengan baik dan tidak ada dana BOS yang tersisa.

3. Kendala dan hambatan pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri Lung Manyo dan SD Swasta Lembah Jaya, yaitu pencairan dana BOS pada tahap pertama selalu terlambat walaupun RKAS sudah diajukan.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Demi terwujudnya efektivitas pemanfaatan dana BOS yang efektif diharapkan sekolah dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan.
2. Sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakatkhususnya orang tua/wali murid dan agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat sehingga mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.
3. Dari hasil penelitian ini perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anwar, Idhoci, 2013, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Baharuddin, 2011. "Pendidikan Gratis dan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Administrasi Publik*", Volume 8 (1) Juni 2011 ISSN 2088-527X (Print) ISSN 2548-7787 (Online).
- Daljono, 2011, *Akuntansi Biaya Penentuan Harga Pokok & Pengendalian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Depiani, Depniliza, 2015, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)". *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 302-314.
- Dewi, Ayu Komang Ratna, dkk. 2015. "Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng". *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan*, Volume 6, No 1, Tahun 2015.
- Fattah, Nanang, 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2012, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Konteks Penerapan MBS*, PT. Rosda Karya, Bandung.
- Hamalik, Oemar, 2014, *Evaluasi Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hanifah dan Suhana, Cucu, 2012, *Konsep Strategi Pembelajaran* Refika Aditama, Bandung.
- Harsono, 2007, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah>

- Irsan. 2017. “Keefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD Negeri di Kota Medan”. Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED. PDF Online.
- Kemendikbud, 2013, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional(BOS) di Sekolah SMA /SMK Tahun 2014*, Dirjen Kemendikbud, Jakarta.
- Kemendikbud, 2016, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Depdiknas, Jakarta.
- Kemendiknas,2014, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional (BOS) di Sekolah Tahun 2014*, Dirjen Kemendikbud, Jakarta.
- Matin, 2014,*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyasa, E, 2011,*Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Musfah Jejen, 2015, *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan dan Praktik*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Muslich, Mansur, 2014,*KTSP dan Dasar Pemahaman dan Pengembangan*,Cet-V, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, S, 2003,*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Mode dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta.
- Nurlina, 2013, “*Women Vegetable Traders in Improving Children’s Education in WestPadang*”,*Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4,No. 1 Januari2013.
- Panduan Fasilitasi Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Penyusunan Kebijakan Edisi Juni 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana Prasarana.
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Nomornpersonalia.
- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah.
- Qomar, Mujamil, 2007, *Manajemen Pendidikan Islam*, Airlangga, Jakarta.
- Ramayulis, H, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT. Kalam Mulia, Jakarta.
- Rosyada, Dede, 2013, *Pradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Cet-III, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sardiman, S. Arief, 2014, *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, Tomy, 2009, "Ajari Sekolah Soal Transparansi", *Harian Jogja* dalam (<http://www.suarapembaruan.com>) diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul. 12.00 wib.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi, Dedi, 2010, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT RemajaRosda-Karya, Bandung.
- Suryadi, 2012, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi*, PT. Sarana Panca Karya Nusa, Bandung.
- Sumarni, 2014, "Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah". *EDUKASI Volume 12, Nomor 1, Januari-April 2014*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SD NEGERI LUNG MANYO

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Darimana sajakah biaya pendidikan sekolah di SD Negeri Lung Manyo?
2. Untuk apakah dana BOS tersebut digunakan?
3. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
4. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
5. Apakah petunjuk teknis penggunaan dana BOS memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan langganan daya dan jasa?
6. Dokumen keuangan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan dana pendidikan (BOS) kepada pemerintah?
7. Berdasarkan apa dana pendidikan (BOS) dari pemerintah diberikan?
8. Kapan waktu pencairan dana BOS?
9. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
10. Berapa jumlah dana pertahunnya yang diterima di sekolah ini?
11. Apakah RAB dengan realisasi harus sama?
12. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
13. Data keuangan apa sajakah yang dibuat oleh sekolah guna melaporkan pengeluaran biaya?
14. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
15. Berdasarkan apakah sekolah membuat rencana kegiatan?
16. Apakah semua rencana kegiatan yang dibuat oleh sekolah telah teralisasi semua?
17. Apakah ada kegiatan yang berubah saat adanya dana BOS? Berkurang/bertambah? Apa saja? kenapa?
18. Ada berapa triwulan dana BOS diberikan kesekolahan?
19. Apakah ada perbedaan dana untuk sekolah dasar negeri dan swasta?
20. Apakah penggunaan dana BOS telah dipertanggung jawabkan secara tegas dan tidak menyalahi peraturan yang ada?
21. Berapakah biaya untuk pembuatan laporan-lapora sekolah?
Biaya pembuatan laporan sekolah diambil dari dana BOS sebesar 5%.
22. Apakah ada pengeluaran biaya lain yang terkait dengan biaya operasional sekolah? Jika ada, kegiatan apa saja dan berapa biaya yang dikeluarkan?
23. Apakah seluruh bentuk format formulir administrasi yang diajukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan penggunaan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh sekolah?
24. Apakah ada tambahan sumber dana dari pihak luar?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAKIL KEPALA
SD NEGERI LUNG MANYO**

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui tentang dana BOS di sekolah ini?
2. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
3. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
4. Berapa jumlah dana pertahunnya untuk SD Negeri Lung Manyo?
5. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
6. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
7. Apakah pihak sekolah mengalami kendala dalam proses pencairan dana BOS?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BENDAHARA
SD NEGERI LUNG MANYO**

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk keperluan siswa?
2. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
3. Apakah setiap pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah?
4. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
5. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
6. Apakah buku kas yang telah disusun telah sesuai dengan juknis?
7. Apakah kendala yang dialami pada saat pencairan dana BOS?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SD SWASTA LEMBAH JAYA

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Darimana sajakah biaya pendidikan sekolah di SD Negeri Lung Manyo?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan rencana anggaran dana BOS?
3. Untuk apakah dana BOS tersebut digunakan?
4. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
5. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
6. Apakah petunjuk teknis penggunaan dana BOS memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan langganan daya dan jasa?
7. Dokumen keuangan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan dana pendidikan (BOS) kepada pemerintah?
8. Berdasarkan apa dana pendidikan (BOS) dari pemerintah diberikan?
9. Kapan waktu pencairan dana BOS?
10. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
11. Apakah RAB dengan realisasi harus sama?
12. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
13. Data keuangan apa sajakah yang dibuat oleh sekolah guna melaporkan pengeluaran biaya?
14. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
15. Berdasarkan apakah sekolah membuat rencana kegiatan?
16. Apakah semua rencana kegiatan yang dibuat oleh sekolah telah teralisasi semua?
17. Apakah ada kegiatan yang berubah saat adanya dana BOS? Berkurang/bertambah? Apa saja? kenapa?
18. Ada berapa triwulan dana BOS diberikan kesekolahan?
19. Apakah ada perbedaan dana untuk sekolah dasar negeri dan swasta?
20. Apakah penggunaan dana BOS telah dipertanggung jawabkan secara tegas dan tidak menyalahi peraturan yang ada?
21. Berapakah biaya untuk pembuatan laporan-lapora sekolah?
22. Apakah ada pengeluaran biaya lain yang terkait dengan biaya operasional sekolah? Jika ada, kegiatan apa saja dan berapa biaya yang dikeluarkan?
23. Apakah seluruh bentuk format formulir administrasi yang diajukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan penggunaan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh sekolah?
24. Apakah ada tambahan sumber dana dari pihak luar?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN WAKIL KEPALA
SD SWASTA LEMBAH JAYA**

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui tentang dana BOS di sekolah ini?
2. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
3. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
4. Berapa jumlah dana pertahunnya untuk SD Lembah Jaya?
5. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
6. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
7. Apakah pihak sekolah mengalami kendala dalam proses pencairan dana BOS?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BENDAHARA
SD SWASTA LEMBAH JAYA**

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk keperluan siswa?
2. Bagaimana proses pembuatan RKAS di sekolah ini?
3. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
4. Apakah setiap pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah?
5. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
6. Apakah buku kas yang telah disusun telah sesuai dengan juknis?
7. Apakah kendala yang dialami pada saat pencairan dana BOS?

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SD NEGERI LUNG MANYO

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Darimana sajakah biaya pendidikan sekolah di SD Negeri Lung Manyo? Dari dana BOS
2. Untuk apakah dana BOS tersebut digunakan?
Bahwa saya selaku kepala sekolah SD Negeri Lung Manyo secara nyata telah menggunakan dana BOS tersebut untuk kegiatan-kegiatan sekolah antara lain : 1) pengembangan kompetensi lulusan, 2) pengembangan kurikulum, 3) pengembangan proses pembelajaran, 4) pengembangan peserta didik dan kependidikan, 5) pengembangan sarana dan prasarana, 6) pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, 7) pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dan 8) pengembangan perpustakaan.
3. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
Pengadaan buku bagi siswa merupakan hal sangat urgent dan sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar mereka, karena kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien jika semua siswa sudah memiliki buku pegangan.
4. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
Selama ini tidak ada penarikan biaya kepada peserta didik, biaya yang diperoleh hanya dari dana BOS.
5. Apakah petunjuk teknis penggunaan dana BOS memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan langganan daya dan jasa?
Sejak adanya dana bantuan BOS pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo telah melakukan langganan jasa perangkat internat disekolah yang bertujuan membuka informasi dan teknologi yang bersifat aktual dan mudah diperoleh oleh setiap siswa sekolah” (Kasek, 10/01-2019)
6. Dokumen keuangan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan dana pendidikan (BOS) kepada pemerintah?
DAPODIK (Daftar Pokok Peserta Didik.
7. Berdasarkan apa dana pendidikan (BOS) dari pemerintah diberikan?
Dana BOS dari pemerintah diberikan berdasarkan jumlah siswa dan siswi SD Negeri Lung Manyo yang di onlinekan.
8. Kapan waktu pencairan dana BOS?
Pencairan dana BOS sudah ditentukan untuk tiap triwulan.

9. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintahan Republik Indonesia yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak Sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dibagi terhadap 4 (empat) termin penarikan yakni : Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
10. Berapa jumlah dana pertahunnya yang diterima di sekolah ini?
Bahwa dana BOS yang diterima oleh pihak SD Negeri Lung Manyo untuk tahun anggaran 2018 didasarkan atas perhitungan yang telah ditetapkan peraturan mengenai dana BOS yakni jumlah keseluruhan siswa dikalikan bantuan sebesar Rp. 800.000/ setiap siswa dengan total keseluruhan dana BOS yang masuk ke Kas Sekolah sebesar : $(133 \text{ siswa} \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 106.400.000$
11. Apakah RAB dengan realisasi harus sama?
Ya, antara RAB dan realisasi tidak boleh beda, harus sama.
12. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
Untuk keseluruhan dana BOS yang masuk pada SD Negeri Lung Manyo benar-benar dipergunakan paling utama untuk keperluan penunjang kegiatan belajar siswa yakni penyediaan media belajar siswa berupa buku-buku pelajaran dan alat tulis, selanjutnya untuk kreatifitas siswa dengan menambah kegiatan ekstra kurikuler berupa kegiatan pramuka dan kegiatan olah raga seperti bola kaki, tenis meja dan kesenian tari, sedangkan dana BOS yang tersisa selanjutnya diperuntukkan bagi perbaikan prasarana gedung sekolah.
13. Data keuangan apa sajakah yang dibuat oleh sekolah guna melaporkan pengeluaran biaya?
K-1 sampai K-7, K-7a sampai K-9 data buku kas masuk dan kas keluar tinggal disekolah dan SPJ BOS
14. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
Bahwa untuk pengelolaan dana BOS kita menggunakan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan untuk pembelian dan pengadaan barang dan jasa atau pembuatan rehab bangunan kita menggunakan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa dilingkup pemerintahan.
15. Berdasarkan apakah sekolah membuat rencana kegiatan?
Sekolah dalam membuat rencana kegiatan selalu berpedoman pada 8 Standar Pendidikan dan melalui rapat dewan guru, komite sekolah
16. Apakah semua rencana kegiatan yang dibuat oleh sekolah telah teralisasi semua?
Secara keseluruhan saya rasa belum, hal ini disebabkan karena sering terlambatnya proses pencairan dana BOS.
17. Apakah ada kegiatan yang berubah saat adanya dana BOS? Berkurang/bertambah? Apa saja? kenapa?

Ada, bertambah, kegiatan sepak bola dilaksanakan di Polsek Tualang Cut, Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru, Pelatihan matematika, Karena sangat dibutuhkan setelah Fasilitator Kabupaten baru mendapat pengetahuan selama di Jakarta dan kesepakatan KKKS

18. Ada berapa triwulan dana BOS diberikan kesekolahan?
Empat triwulan
19. Apakah ada perbedaan dana untuk sekolah dasar negeri dan swasta?
Tidak ada, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
20. Apakah penggunaan dana BOS telah dipertanggung jawabkan secara tegas dan tidak menyalahi peraturan yang ada?
1) Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C), 2) 2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2), 3) melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota, 4) memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, 5) mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan, 6) mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Kepala Sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan komite sekolah (Formulir BOS-03), 7) mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04), 8) bertanggung jawab secara formal dan material atas pengguna hibah yang diterimanya, 9) membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7), laporan ini disimpan di Sekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya, 10) melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3. BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6), 11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, 12) memasang spanduk di Sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05), 13) bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, 14) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.
21. Berapakah biaya untuk pembuatan laporan-lapora sekolah?
Biaya pembuatan laporan sekolah diambil dari dana BOS sebesar 5%.
22. Apakah ada pengeluaran biaya lain yang terkait dengan biaya operasionalsekolah? Jika ada, kegiatan apa saja dan berapa biaya yang dikeluarkan?
Tidak ada
23. Apakah seluruh bentuk format formulir administrasi yang diajukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan penggunaan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh sekolah?

Seluruh pembuatan administrasi pengelolaan dibuat secara teknis oleh bendahara pengeluaran sekolah sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis, selanjutnya saya selaku pimpinan sekolah melakukan koreksi kebenaran materiil isi laporan apakah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan disekolah, dan selanjutnya disampaikan kepada dewan guru dan komite sekolah sebelum disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten agar tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana BOS.

24. Apakah ada tambahan sumber dana dari pihak luar?

Tidak ada

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WAKIL KEPALA SD NEGERI LUNG MANYO

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui tentang dana BOS di sekolah ini?
ya, benar saya mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo sampai dengan tahun anggaran saat ini.
2. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
Tidak ada
3. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintahan Republik Indonesia yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak Sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dibagi terhadap 4 (empat) termin penarikan yakni : Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember
4. Berapa jumlah dana pertahunnya untuk SD Negeri Lung Manyo?
Tergantung jumlah siswa di SD Negeri Lung Manyo.
5. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
Secara nyata dana BOS tahun Anggran 2018 yang masuk pada sekolah SD Negeri Lung Manyo diperuntukkan secara nyata-nyata untuk sepenuhnya bagi kepentingan peningkatan belajar siswa, dimana mengedepankan penggunaan dana BOS untuk keperluan siswa secara nyata yakni pembelian buku pelajaran dan alat tulis belajar siswa dan kegiatan yang menunjang prestasi siswa diluar kegiatan belajar mengajar.
6. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
Bahwa saya selaku wakil kepala SD Negeri Lung Manyo dalam setiap pembuatan pelaporan kegiatan sekolah yang bersumber dari dana BOS selalu terlebih dahulu diberitahukan oleh kepala sekolah dan bendahara, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
7. Apakah pihak sekolah mengalami kendala dalam proses pencairan dana BOS?
dana BOS di sekolah selalu berjalan lancar, namun untuk tahap pertama biasanya tidak cair secara lancar, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran kepala sekolah, guru, maupun TU menalangi terlebih dahulu.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SD NEGERI LUNG MANYO

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk keperluan siswa?
dana BOS yang diterima pada Sekolah SD Negeri Lung Manyo secara nyata telah membebaskan seluruh siswa-siswi dari pembayaran biaya sekolah maupun pembelian buku-buku belajar dan alat tulis belajar.
2. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
Sejak adanya dana bantuan BOS seluruh siswa tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan tugas belajar karena alasan ketiadaan buku pelajaran, sehingga siswa secara keseluruhan merasakan kesetaraan dalam menerima hasil pelajaran.
3. Apakah setiap pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah?
Ya, semua pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah
4. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
untuk pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, pihak dewan guru juga mendapatkan pemberitahuan dan pemaparan seluruh realisasi penggunaan dana BOS yang dilaporkan sehingga lebih terbuka.
5. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
bahwa untuk kegiatan operasional langsung dengan siswa kita menggunakan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan untuk belanja barang dan pengadaan barang untuk keperluan sekolah kita menggunakan Kepres 54 tahun 2010 yang mengatur jumlah dan nominal keuangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan barang dan jasa, seperti contoh untuk kegiatan Rp.5.000.000,- harus dibuat kwitansi dan materai sedangkan diatas Rp.50.000.000,- harus dibuatkan surat perjanjian kerja (SPK).
6. Apakah buku kas yang telah disusun telah sesuai dengan juknis?
untuk seluruh administrasi keuangan atas penggunaan dana BOS pada SD Negeri Lung Manyo telah disusun secara lengkap, tertata rapi, serta membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
7. Apakah kendala yang dialami pada saat pencairan dana BOS?
dana BOS di sekolah selalu lancar, tetapi tahap pertama dana BOS belum bisa keluar meskipun RKAS sudah diajukan.

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SD SWASTA LEMBAH JAYA

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Darimana sajakah biaya pendidikan sekolah di SD Negeri Lung Manyo?
Dana BOS sangat membantu sekali dalam pembiayaan mutu pendidikan, karena dana BOS satu-satunya sumber dalam pengelolaan sekolah.
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan rencana anggaran dana BOS?
Yang terlibat dalam proses penyusunan rencana anggaran dana BOS yaitu kepala sekolah, guru, dan komite sekolah
3. Untuk apakah dana BOS tersebut digunakan?
Penggunaan dana BOS di sekolah digunakan sesuai RKAS, dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah, dan diterapkan ke dalam 8 Standar Nasional pendidikan (SNP)
4. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
Ya, karena dana BOS memang diperuntukkan membantu peserta didik.
5. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
Tidak ada
6. Apakah petunjuk teknis penggunaan dana BOS memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan langganan daya dan jasa?
ya
7. Dokumen keuangan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan dana pendidikan (BOS) kepada pemerintah?
DAPODIK (Daftar Pokok Peserta Didik.
8. Berdasarkan apa dana pendidikan (BOS) dari pemerintah diberikan?
Berdasarkan kebutuhan sekolah.
9. Kapan waktu pencairan dana BOS?
Sekolah menerima dana BOS setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), dan sesuai petunjuk teknis BOS pada sekolah
10. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
Tergantung jumlah siswa di SD Swasta Lembah Jaya
11. Apakah RAB dengan realisasi harus sama?
Ya, antara RAB dan realisasi harus sama
12. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?

Ya

13. Data keuangan apa sajakah yang dibuat oleh sekolah guna melaporkan pengeluaran biaya?
K-1 sampai K-7, K-7a sampai K-9 data buku kas masuk dan kas keluar tinggal di sekolah dan SPJ BOS
14. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan juknis
15. Berdasarkan apakah sekolah membuat rencana kegiatan?
Berdasarkan kebutuhan sekolah
16. Apakah semua rencana kegiatan yang dibuat oleh sekolah telah teralisasi semua?
Belum, karena proses pencairan dana BOS selalu terlambat
17. Apakah ada kegiatan yang berubah saat adanya dana BOS?
Berkurang/bertambah? Apa saja? kenapa?
Tidak ada
18. Ada berapa triwulan dana BOS diberikan ke sekolah?
Empat triwulan. Pengambilan dana diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan sekolah, diambil sesuai aturan dan sesuai RKAS
19. Apakah ada perbedaan dana untuk sekolah dasar negeri dan swasta?
Tidak ada, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
20. Apakah penggunaan dana BOS telah dipertanggung jawabkan secara tegas dan tidak menyalahi peraturan yang ada?
Ya
21. Berapakah biaya untuk pembuatan laporan-laporan sekolah?
Biaya pembuatan laporan sekolah diambil dari dana BOS sebesar 5%.
22. Apakah ada pengeluaran biaya lain yang terkait dengan biaya operasional sekolah? Jika ada, kegiatan apa saja dan berapa biaya yang dikeluarkan?
Tidak ada
23. Apakah seluruh bentuk format formulir administrasi yang diajukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan penggunaan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh sekolah?
Ya, harus sesuai
24. Apakah ada tambahan sumber dana dari pihak luar?
Tidak ada

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WAKIL KEPALA SD SWASTA LEMBAH JAYA

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui tentang dana BOS di sekolah ini?
Ya, dana BOS di sekolah ini semua memang sudah tahu
2. Apakah ada penarikan biaya kepada peserta didik?
Tidak ada
3. Berapa jumlah dana setiap triwulannya?
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintahan Republik Indonesia yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diterima oleh pihak Sekolah SD Negeri Lung Manyo yang dibagi terhadap 4 (empat) termin penarikan yakni : Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember
4. Berapa jumlah dana pertahunnya untuk SD Lembah Jaya?
Tergantung jumlah siswa.
5. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan peningkatan belajar siswa?
Ya
6. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap pengelolaan dana BOS?
Bahwa saya selaku wakil kepala sekolah dalam setiap pembuatan pelaporan kegiatan sekolah yang bersumber dari dana BOS selalu terlebih dahulu diberitahukan oleh kepala sekolah dan bendahara, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
7. Apakah pihak sekolah mengalami kendala dalam proses pencairan dana BOS?
Pencairan dana BOS di sekolah selalu berjalan lancar, hanya saja untuk bulan Januari-Maret atau pada tahap pertama biasanya tidak cair secara lancar, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran kepala sekolah, guru, maupun TU menalangi terlebih dahulu.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SD SWASTA LEMBAH JAYA

A. IDENTITAS WAWANCARA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari, tanggal :

B. PERTANYAAN

1. Apakah anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dipergunakan untuk keperluan siswa?
Penggunaan dana BOS di sekolah ini digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan digunakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah tahun 2018
2. Bagaimana proses pembuatan RKAS di sekolah ini?
Setelah RKAS dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah, kemudian sekolah mengadakan musyawarah lagi kepada wali murid, guru, komite, kepala sekolah, dan pihak yang terkait untuk membahas rencana pembelanjaan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan dana BOS
Sekolah menyusun anggaran dalam bentuk RKAS kemudian diajukan, setelah disetujui dana BOS bisa cair, untuk bukti atau kuitansi sudah tertera dalam laporan pertanggungjawaban
3. Apakah keberadaan dana BOS dapat membantu para peserta didik khususnya dalam hal pembelian buku pelajaran?
Sejak adanya dana bantuan BOS seluruh siswa tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun pelaksanaan tugas belajar karena alasan ketiadaan buku pelajaran, sehingga siswa secara keseluruhan merasakan kesetaraan dalam menerima hasil pelajaran.
4. Apakah setiap pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah?
Ya, semua pengeluaran biaya berkaitan dengan keperluan sekolah
5. Apakah penggunaan dana BOS mengacu pada juknis yang ditentukan?
bahwa keseluruhan dana BOS yang diterima SD Swasta Lembah Jaya digunakan sesuai aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah. Dari keseluruhan dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan Standar Nasional Pendidikan
6. Apakah buku kas yang telah disusun telah sesuai dengan juknis?
untuk seluruh administrasi keuangan atas penggunaan dana BOS pada SD Negeri Lung Manyo telah disusun secara lengkap, tertata rapi, serta membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
7. Apakah kendala yang dialami pada saat pencairan dana BOS?
Untuk pencairan dana BOS di sekolah selalu lancar, tapi untuk tahapan pertama biasanya di bulan Januari sampai Maret dana BOS belum bisa keluar meskipun RKAS sudah diajukan

Lampiran 5

**LEMBAR OBSERVASI DI SD NEGERI LUNG MANYO DAN SD
SWASTA LEMBAH JAYA**

Nama Peneliti : Suria Bakti

Tanggal Observasi :

No	Aspek yang diteliti	Indikator	Status		Keterangan
			Ada	Tidak ada	
1	Sistem manajemen sekolah	Struktur organisasi sekolah			
		RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)			
		Kurikulum			
		Job deskripsi pendidik dan kependidikan			
		Kondisi belajar siswa			
2	Pembiayaan pendidikan	Perencanaan Anggaran			
		Pelaksanaan Anggaran			
		Evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran			
3	Sarana dan Prasarana Sekolah	Ruang Kepala Sekolah			
		Ruang Wakil Kepala Sekolah			
		Ruang guru			
		Ruang Tata Usaha			
		Ruang kelas			
		Ruang BK			
		Ruang UKS			
		Ruang Koperasi			
		Ruang OSIS			
		Lab. Komputer			
		Lab. IPA			
		Halaman/ lapangan Sekolah			
Perpustakaan					

Lampiran 6

STUDI DOKUMENTASI DI SD NEGERI LUNG MANYO DAN SD SWASTA LEMBAH JAYA

No	Jenis Dokumen	Indikator	Keterangan	
			Ada	Tidak ada
1	Profil	Sejarah singkat UPTD		
		Visi, misi dan tujuan		
		Struktur organisasi		
2	Data Ketenagaan	Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman, dan tugas, dsb		
3	Data Sekolah	Data seluruh sekolah dasar swasta dan negeri di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan V Kab. Aceh Tamiang untuk tahun 2018		
4	Data Sarana dan Prasarana	Data Aset		
		Program Sarana dan Prasarana		
5	Laporan pertanggung jawaban setiap sekolah	LPJ BOS SD Negeri		
		LPJ BOS SD Swasta		



RAPOR MUTU 2018

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

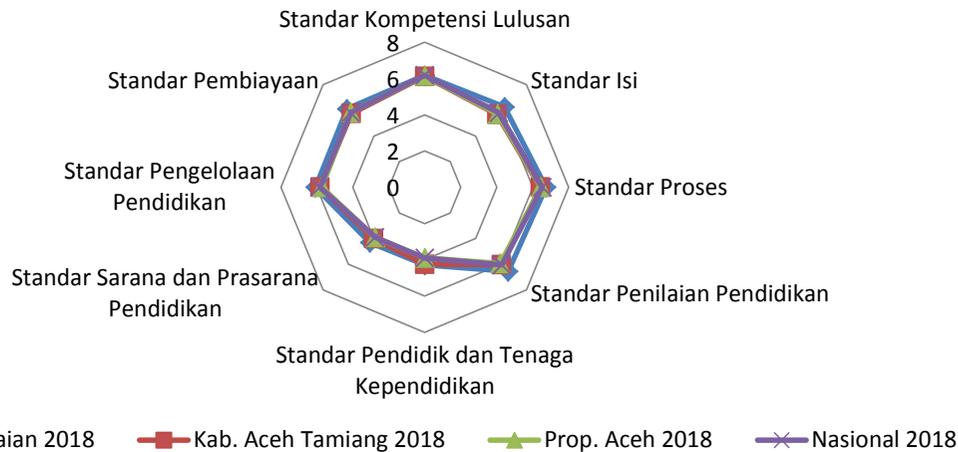


IDENTITAS

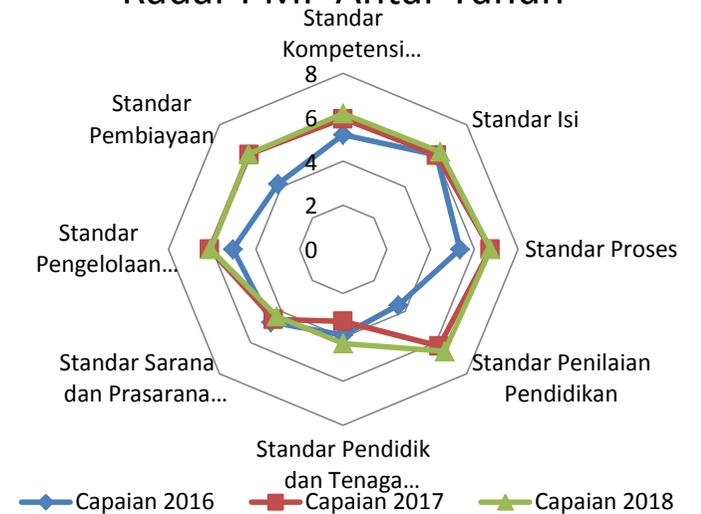
Nama Sekolah	: SD NEGERI LUNG MANYO
NPSN	: 10104232
Kabupaten	: Kab. Aceh Tamiang
Provinsi	: Prop. Aceh
	2016 2017 2018
Capaian Sekolah	: 4,75 5,61 5,82
Capaian Kabupaten/Kota	: 4,59 5,35 5,51
Capaian Provinsi	: 4,47 5,18 5,46
Capaian Nasional	: 4,34 5,13 5,51

CAPAIAN PER STANDAR

Radars PMP 2018



Radars PMP Antar Tahun



Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Kab. Aceh Tamiang 2018	Prop. Aceh 2018	Nasional 2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,21	5,93	6,17	6,12	6,15	6,18
2	Standar Isi	6,05	6,05	6,27	5,68	5,72	5,82
3	Standar Proses	5,34	6,74	6,74	6,43	6,47	6,53
4	Standar Penilaian Pendidikan	3,58	6,22	6,56	6,03	5,94	6,06
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,9	3,27	4,28	4,25	3,89	3,9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,68	4,5	4,31	4,01	3,91	3,9
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,05	6,11	6,08	5,81	5,73	5,84
8	Standar Pembiayaan	4,21	6,09	6,12	5,76	5,83	5,82

KATEGORI CAPAIAN

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★ Menuju SNP 1	0	2,04
★★ Menuju SNP 2	2,05	3,7
★★★ Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★ Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★ SNP	6,67	7

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,21	★★★★	5,93	★★★★	6,17	★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,3	★★★★	6,99	★★★★★	6,98	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	7	★★★★★	6,97	★★★★★	7	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,93	★★★★★	6,97	★★★★★	7	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,48	★★★★	7	★★★★★	6,92	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,02	★★★★	6,99	★★★★★	6,95	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	5,87	★★★★	7	★★★★★	6,92	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,22	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	5,26	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	7	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★

1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	5,89	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,34	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	3,5	★★	2,56	★★	3,55	★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	3,5	★★	2,56	★★	3,55	★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	5,84	★★★★	6,54	★★★★	6,68	★★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5,39	★★★★	6,07	★★★★	6,23	★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5,54	★★★★	5,69	★★★★	5,85	★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,06	★★★★	6,91	★★★★★	7	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	5,26	★★★★	6,65	★★★★	7	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,94	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5,85	★★★★	6,96	★★★★★	6,99	★★★★★
2 Standar Isi		6,05	★★★★	6,05	★★★★	6,27	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,89	★★★★★	6,22	★★★★	6,4	★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6,9	★★★★★	5,75	★★★★	6,06	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,98	★★★★★	5,93	★★★★	6,34	★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,88	★★★★★	5,6	★★★★	6,09	★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,98	★★★★★	6,91	★★★★★	6,74	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,73	★★★★★	6,91	★★★★★	6,74	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	4,43	★★★	6,39	★★★★	6,64	★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	3,28	★★	6,14	★★★★	6,55	★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	5,57	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	*		5,42	★★★★	6,02	★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	*		6,98	★★★★★	7	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	*		5,56	★★★★	5,79	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,7	★★★★★	6,92	★★★★★	7	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	*		1,55	*	2,33	★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6,93	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	*		6,78	★★★★★	6,82	★★★★★
3 Standar Proses		5,34	★★★★	6,74	★★★★★	6,74	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,12	★★★★	6,72	★★★★★	6,76	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4,47	★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	7	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,22	★★★★	6,58	★★★★	6,82	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,8	★★★★★	6,3	★★★★	6,22	★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	5,2	★★★★	6,94	★★★★★	6,92	★★★★★

3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,85 ★★★★★	6,88 ★★★★★	6,88 ★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,56 ★★★★	7 ★★★★★	6,95 ★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	4,19 ★★★	6,99 ★★★★★	6,92 ★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	5,97 ★★★★	6,99 ★★★★★	6,92 ★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,09 ★★★★	7 ★★★★★	6,94 ★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,02 ★★★★	6,99 ★★★★★	6,9 ★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	5,96 ★★★★	6,99 ★★★★★	6,92 ★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	5,96 ★★★★	6,99 ★★★★★	6,93 ★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,17 ★★★★	7 ★★★★★	6,88 ★★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4,17 ★★★	7 ★★★★★	6,86 ★★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	4,58 ★★★	6,93 ★★★★★	6,94 ★★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	★	6,8 ★★★★★	6,91 ★★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	2,39 ★★	6,53 ★★★★	6,95 ★★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	2,81 ★★	6,88 ★★★★★	6,98 ★★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	5,05 ★★★	7 ★★★★★	6,98 ★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	4,71 ★★★	6,57 ★★★★	6,54 ★★★★
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	★	6,99 ★★★★★	6,99 ★★★★★
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	★	5,6 ★★★★	6,53 ★★★★
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	4,73 ★★★	6,68 ★★★★★	6,76 ★★★★★
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5,43 ★★★★	6,61 ★★★★	5,83 ★★★★
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4,17 ★★★	6,77 ★★★★★	6,48 ★★★★
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	4,51 ★★★	6,79 ★★★★★	6,62 ★★★★
4 Standar Penilaian Pendidikan		3,58 ★★	6,22 ★★★★	6,56 ★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	3,66 ★★	6,99 ★★★★★	6,99 ★★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	3,24 ★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	4,08 ★★★	6,99 ★★★★★	6,99 ★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	2,92 ★★	5,78 ★★★★	6,22 ★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	3,24 ★★	5,24 ★★★★	5,97 ★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	2,6 ★★	6,32 ★★★★	6,47 ★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4,47 ★★★	6,41 ★★★★	6,61 ★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	4,96 ★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	3,98 ★★★	5,82 ★★★★	6,22 ★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	2,76 ★★	6,1 ★★★★	6,37 ★★★★

4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	2,59 **	6,47 ****	6,48 ****
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	2,93 **	6,16 ****	6,44 ****
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	2,76 **	5,68 ****	6,19 ****
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4,1 ***	5,82 ****	6,63 ****
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	4,96 ***	6,15 ****	6,41 ****
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	3,24 **	6,12 ****	6,48 ****
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	*	5,2 ****	6,99 *****
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3,9 ***	3,27 **	4,28 ***
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5,07 ****	3,67 **	4,29 ***
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,22 ****	0 *	4,2 ***
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	5,92 ****	0,22 *	7 *****
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	*	7 *****	2,8 **
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	3,54 **	3,54 **	3,54 **
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4,61 ***	4,61 ***	4,61 ***
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	0 *
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5,24 ****	4,78 ***	6,71 *****
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	*	0 *	7 *****
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	*	0 *	7 *****
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	*	0 *	7 *****
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,5 **	*	3,5 **
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	4,95 ***	*	4,95 ***
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	5,83 ****	5,83 ****	5,83 ****
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	1,75 *	4,95 ***	1,75 *
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4,89 ***	4,89 ***	4,89 ***
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,4 *	2,52 **	1,26 *
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	*	*	0 *
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	*	*	0 *
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	*	*	*
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	7 *****	7 *****	7 *****
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	0 *	0 *	0 *
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*

5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	★	★	★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	★	★	★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	★	★	★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1,4 ★	0 ★	0 ★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	★	0 ★	0 ★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	★	0 ★	0 ★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	★	★	★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	★	★	0 ★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0 ★	0 ★	0 ★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	★	★	★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0 ★	★	0 ★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	★	0 ★	★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	★	★	★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	★	★	★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	★	★	★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	★	★	★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1,4 ★	0 ★	3,15 ★★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	★	0 ★	7 ★★★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	★	0 ★	0 ★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	★	★	★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	★	★	7 ★★★★★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0 ★	0 ★	0 ★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	★	★	7 ★★★★★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	★	★	★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	★	★	★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	★	★	★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	★	★	★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	★	★	★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	★	★	★
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4,68 ★★★	4,5 ★★★	4,31 ★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	7 ★★★★★	5,16 ★★★★★	4,83 ★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7 ★★★★★	6 ★★★★★	★
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	7 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	★	6,06 ★★★★★	7 ★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	★	★	3,5 ★★

6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	*	5,74	★★★★	7	★★★★★	
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	*	2	**	2,8	**	
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	0,62	*	1,8	*	2,69	**
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1,88	*	3,95	***	5,81	★★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	*		0	*	0	*
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	0	*	1,93	*	3,67	**
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	*		0	*	0	*
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	0	*	4,2	***	4,66	***
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	*		0	*	0	*
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	*		2,33	**	0	*
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	*		*		7	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6,41	★★★★	1,95	*	1,79	*
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	*		0	*	0	*
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	*		0	*	0	*
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	*		0	*	0	*
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	*		0	*	0	*
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	6,41	★★★★	4,67	***	5,42	★★★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	*		0	*	0	*
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	*		*		*	
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	*		7	★★★★★	7	★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	*		6,53	★★★★	6,99	★★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	*		3,5	**	0	*
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	*		0	*	0	*
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	*		0,46	*	1,4	*
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	*		0	*	0	*
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	*		1,75	*	4,66	***
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	*		*		*	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	*		7	★★★★★	7	★★★★★
	7 Standar Pengelolaan Pendidikan	5,05	***	6,11	★★★★	6,08	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	4,54	***	6,57	★★★★	6,64	★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	4,87	***	6,39	★★★★	6,63	★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	4,79	***	6,53	★★★★	6,49	★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	3,96	***	6,77	★★★★★	6,8	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	4,97	***	6,54	★★★★	6,64	★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	4,7	***	6,24	★★★★	6,51	★★★★

7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	4,25 ★★★	5,84 ★★★★★	6,38 ★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	5,82 ★★★★★	6,96 ★★★★★	6,97 ★★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	4,27 ★★★	6,93 ★★★★★	6,88 ★★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,71 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	4,04 ★★★	6,3 ★★★★★	6,12 ★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	4,18 ★★★	2,21 ★★	2,3 ★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	4,2 ★★★	★	★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	★	6,94 ★★★★★	6,96 ★★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	4,95 ★★★	★	0 ★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	★	6,37 ★★★★★	6,86 ★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	5,83 ★★★★★	★	0 ★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	1,75 ★	★	0 ★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,53 ★★★★★	6,52 ★★★★★	6,22 ★★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,53 ★★★★★	6,52 ★★★★★	6,22 ★★★★★
8 Standar Pembiayaan		4,21 ★★★	6,09 ★★★★★	6,12 ★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	2,33 ★★	6,99 ★★★★★	6,99 ★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0 ★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	0 ★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,99 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,99 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3,3 ★★	4,29 ★★★	4,36 ★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	7 ★★★★★	0 ★	0 ★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	0,62 ★	5,93 ★★★★★	6,24 ★★★★★



RAPOR MUTU 2018

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



IDENTITAS

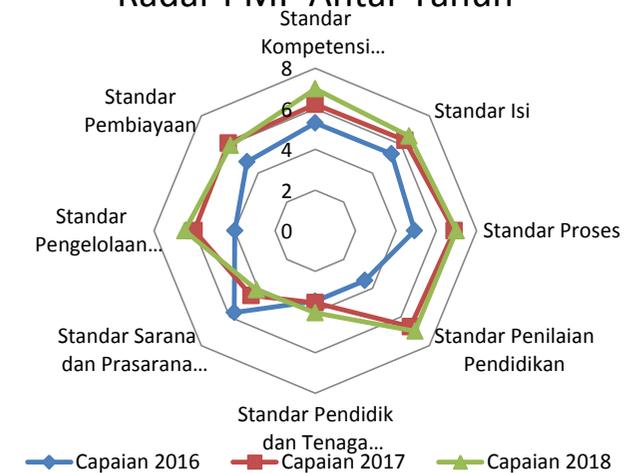
Nama Sekolah	: SD SWASTA LEMBAH JAYA
NPSN	: 10104336
Kabupaten	: Kab. Aceh Tamiang
Provinsi	: Prop. Aceh
	2016 2017 2018
Capaian Sekolah	: 4,62 5,78 6,01
Capaian Kabupaten/Kota	: 4,59 5,35 5,51
Capaian Provinsi	: 4,47 5,18 5,46
Capaian Nasional	: 4,34 5,13 5,51

CAPAIAN PER STANDAR

Radar PMP 2018



Radar PMP Antar Tahun



Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Kab. Aceh Tamiang 2018	Prop. Aceh 2018	Nasional 2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,3	6,22	6,99	6,12	6,15	6,18
2	Standar Isi	5,35	6,29	6,58	5,68	5,72	5,82
3	Standar Proses	4,92	6,88	6,99	6,43	6,47	6,53
4	Standar Penilaian Pendidikan	3,47	6,68	6,99	6,03	5,94	6,06
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,47	3,54	4,03	4,25	3,89	3,9
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5,68	4,5	4,11	4,01	3,91	3,9
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	3,99	6	6,47	5,81	5,73	5,84
8	Standar Pembiayaan	4,79	6,09	5,94	5,76	5,83	5,82

KATEGORI CAPAIAN

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★ Menuju SNP 1	0	2,04
★★ Menuju SNP 2	2,05	3,7
★★★ Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★ Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★ SNP	6,67	7

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,3	★★★★	6,22	★★★★	6,99	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,82	★★★★★	6,99	★★★★★	6,99	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,68	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,97	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,96	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,88	★★★★★	6,99	★★★★★	6,99	★★★★★
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,74	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,65	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,53	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,92	★★★★★	7	★★★★★	6,97	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,89	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	3,5	★★	3,59	★★	7	★★★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	3,5	★★	3,59	★★	7	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	5,59	★★★★	6,77	★★★★★	7	★★★★★

1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	5,39	★★★★	6,49	★★★★	7	★★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	4,75	★★★	6,16	★★★★	6,99	★★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	5,36	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	5,4	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,95	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	5,68	★★★★	6,99	★★★★★	6,99	★★★★★
2 Standar Isi		5,35	★★★★	6,29	★★★★	6,58	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,51	★★★★	6,68	★★★★★	6,94	★★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	6,9	★★★★★	6,48	★★★★	7	★★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,51	★★★★	6,61	★★★★	7	★★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,54	★★★★	6,35	★★★★	7	★★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,21	★★★★	6,99	★★★★★	6,86	★★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,38	★★★★	6,99	★★★★★	6,86	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	3,72	★★★	6,61	★★★★	6,96	★★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	2,38	★★	6,6	★★★★	6,95	★★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	5,06	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	*		5,84	★★★★	6,9	★★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	*		7	★★★★★	7	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	*		5,59	★★★★	5,83	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,43	★★★★	6,92	★★★★★	7	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	*		1,54	*	2,33	★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5,21	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	*		6,9	★★★★★	6,99	★★★★★
3 Standar Proses		4,92	★★★	6,88	★★★★★	6,99	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	5,43	★★★★	6,85	★★★★★	6,99	★★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	4,66	★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,8	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	5,31	★★★★	6,93	★★★★★	6,99	★★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	4,95	★★★	6,48	★★★★	7	★★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	4,95	★★★	7	★★★★★	6,99	★★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	7	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,53	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	3,51	★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,3	★★★★	6,99	★★★★★	7	★★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,67	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,68	★★★★★	6,99	★★★★★	7	★★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,27	★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,26	★★★★	6,99	★★★★★	7	★★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,78	★★★★★	7	★★★★★	7	★★★★★

3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4,02 ***	7 *****	7 *****
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	1,83 *	6,99 *****	7 *****
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	*	6,99 *****	7 *****
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	1,4 *	7 *****	7 *****
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	1,55 *	7 *****	7 *****
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	4,49 ***	7 *****	7 *****
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	4,39 ***	6,8 *****	7 *****
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	*	6,99 *****	6,99 *****
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	*	7 *****	7 *****
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	4,66 ***	6,82 *****	7 *****
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5,03 ***	6,84 *****	7 *****
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	4,16 ***	6,72 *****	7 *****
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	3,72 ***	6,44 ****	7 *****
4 Standar Penilaian Pendidikan		3,47 **	6,68 *****	6,99 *****
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4,19 ***	6,99 *****	6,99 *****
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	3,88 ***	7 *****	7 *****
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	4,49 ***	6,99 *****	6,99 *****
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	3,57 **	6,64 ****	6,99 *****
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	3,88 ***	6,49 ****	6,99 *****
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	3,26 **	6,8 *****	7 *****
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	2,87 **	6,79 *****	6,99 *****
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	2,79 **	7 *****	7 *****
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	2,94 **	6,58 ****	6,99 *****
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	3,4 **	6,75 *****	6,99 *****
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	3,47 **	6,96 *****	7 *****
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	3,6 **	6,77 *****	7 *****
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3,14 **	6,51 ****	7 *****
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	3,34 **	6,21 ****	6,99 *****
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	2,79 **	6,68 *****	7 *****
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	3,88 ***	6,74 *****	7 *****
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	*	5,2 ****	6,99 *****
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3,47 **	3,54 **	4,03 ***
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5,28 ****	5,43 ****	5,08 ****
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	7 *****	7 *****	4,66 ***
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	5,65 ****	0,22 *	7 *****
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	*	7 *****	2,33 **
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4 ***	4 ***	4 ***

5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4,47 ***	4,47 ***	4,47 ***
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	0 *
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5,14 ****	4,7 ***	6,17 ****
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	*	0 *	7 *****
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	7 *****	7 *****	7 *****
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	*	0 *	7 *****
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	*	0 *	0 *
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2,33 **	*	2,33 **
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	5,83 ****	*	5,83 ****
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	5,25 ****	5,25 ****	5,25 ****
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,91 **	5,83 ****	2,91 **
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,85 ***	3,85 ***	3,85 ***
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	0 *	0 *	0 *
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	*	*	0 *
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	*	*	0 *
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	*	*	*
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	0 *	0 *	0 *
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	0 *	0 *	0 *
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	*	*	*
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0 *	0 *	0 *
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	*	0 *	0 *
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	*	0 *	0 *
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	*	*	*
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	*	*	0 *
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0 *	0 *	0 *
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	*	*	*
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0 *	*	0 *
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	*	0 *	*
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	*	*	*
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0 *	0 *	1,05 *

5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	*	0 *	0 *
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	*	0 *	0 *
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	*	*	*
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	*	*	0 *
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0 *	0 *	0 *
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	*	*	7 ★★★★★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	*	*	*
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	*	*	*
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	*	*	*
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		5,68 ★★★★★	4,5 ★★★	4,11 ★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	7 ★★★★★	5,19 ★★★★★	4,69 ★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7 ★★★★★	6 ★★★★★	*
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	7 ★★★★★	7 ★★★★★	7 ★★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	*	6,06 ★★★★★	7 ★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	*	*	3,5 **
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	*	5,91 ★★★★★	7 ★★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	*	1,98 *	1,4 *
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	4,81 ★★★	1,58 *	2,05 **
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	1,61 *	3,46 **	4,8 ★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	*	0 *	0 *
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	7 ★★★★★	1,52 *	1,92 *
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	*	0 *	0 *
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,83 ★★★★★	4,07 ★★★	4,99 ★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	*	0 *	0 *
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	*	2,33 **	0 *
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	*	*	7 ★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	5,25 ★★★★★	1,87 *	1,6 *
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	*	0 *	0 *
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	*	0 *	0 *
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	*	0 *	0 *
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	*	0 *	0 *
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	5,25 ★★★★★	1,71 *	0,7 *
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	*	0 *	0 *
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	*	*	*
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	*	7 ★★★★★	7 ★★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	*	6,99 ★★★★★	6,99 ★★★★★

6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	*	3,5 **	0 *
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	*	0 *	0 *
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	*	0,58 *	1,4 *
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	*	0 *	0 *
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	*	0,87 *	4,66 ***
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	*	*	*
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	*	7 *****	7 *****
7 Standar Pengelolaan Pendidikan			3,99 ***	6 *****
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		5,51 ****	6,61 ****
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan		6,79 *****	6,96 *****
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan		6,53 ****	6,9 *****
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah		3,2 **	6,7 *****
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		4,43 ***	6,88 *****
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap		3,71 ***	6,35 ****
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan		2,33 **	6,94 *****
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan		6 ****	7 *****
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri		5,01 ***	7 *****
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan		4,26 ***	7 *****
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran		5,24 ****	7 *****
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		4,27 ***	2,24 **
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		3,09 **	*
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan		*	7 *****
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik		5,83 ****	0 *
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik		*	6,48 ****
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan		5,25 ****	0 *
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik		2,91 **	0 *
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		1,75 *	5,78 ****
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan		1,75 *	5,78 ****
8 Standar Pembiayaan			4,79 ***	6,09 ****
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang		2,33 **	6,99 *****
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu		0 *	7 *****
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas		0 *	7 *****
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu		7 *****	7 *****
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan		6,92 *****	7 *****
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan		6,92 *****	7 *****
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik		5,12 ****	4,28 ***
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya		7 *****	0 *
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana		6,3 ****	5,94 ****

8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

2,07 **

6,92 ★★★★★

4,62 ★★★



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. / Fax : (0641) 31286 Karang Baru. Kode Pos 24476
E-mail : disdikatam@yahoo.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800 / C.1 / 1383

Dasar : Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Nomor : 426.3/D.3/3531/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal Informasi Penyelenggaraan Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Tahun 2018.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama/Nip	Gol	Jabatan	Unit Kerja
1.	Eva Deliana Br Bangun, S.Pd/ 19801220 200604 2 008	III d	Guru Bahasa Inggris	SMPN. 2 Seruway
2.	Dian Andrianto, S.pd/ 19861207 201503 1 007	IIIa	Guru Matematika	SMPN.6 Bendahara
3.	Kurnia Rahmianum, S.Pd/ 19870103 201003 2 003	III/d	Guru Matematika	SMPN. 4 Percontohan
4.	Tengku Marni Adriyah, S.Pd/ 19821225 200904 2 008	IIIc	Guru IPS	SMPN. 10 Kej. Muda
5.	Jamaluddin, S.pd/ 19880721 201503 1 003	IIIa	Guru Kelas	SDN. Lueng Manyo

Untuk : Mengikuti Seleksi Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Tahun 2018, pada tanggal 03 s.d 05 April 2018. Check In Tanggal 03 April 2018 Pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Tanah abe No.71 Kampung Mulia, Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123.

Lamanya Tugas : 3 (Tiga) hari, mulai tanggal 03 s.d. 05 April 2018

Selesai Tugas : 05 Maret 2018

Melapor Kepada : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Dikeluarkan : di Karang Baru
Pada tanggal : 02 April 2018

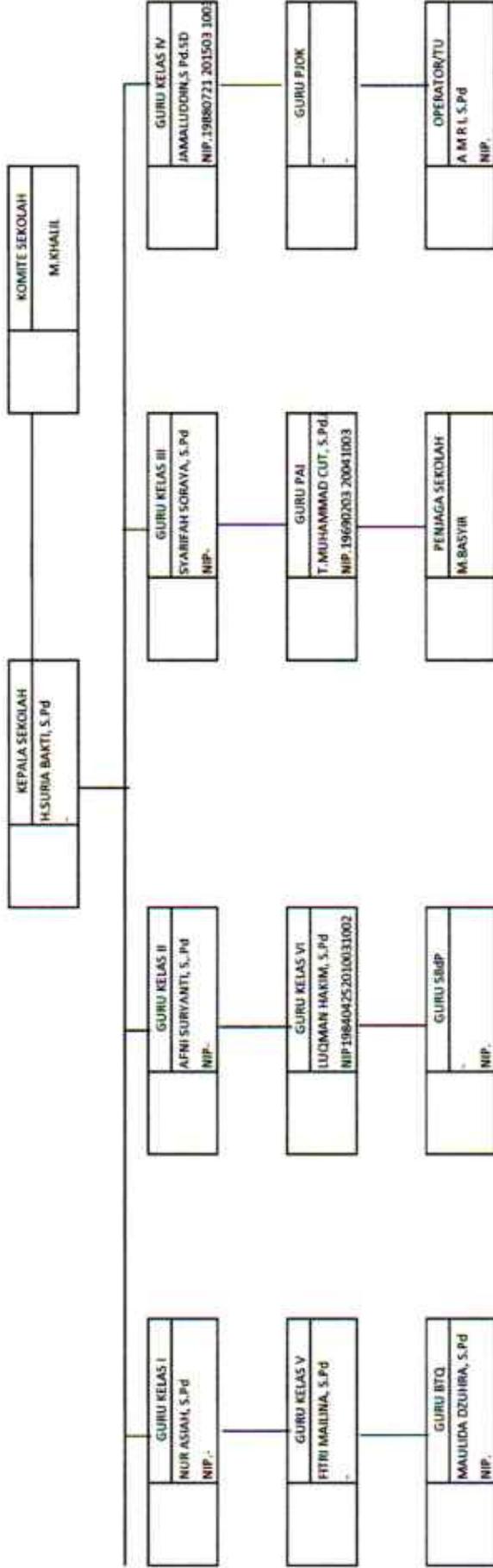
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang



Drs. IKHWANUDDIN
Pembina Utama Muda

NIP. 19601128 198603 1 003

STRUKTUR ORGANISASI
SD NEGERI LUNG MANYO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019



LUNG MANYO, 26 JULI 2018
KEPALA SD NEGERI LUNG MANYO

H. Suria Bakti
(H. SURIA BAKTI, S.Pd.)
NIP. 19700210 199305 1 001

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2018**

Nama Sekolah : SD Swasta Lembah Jaya
 Alamat : Krueng Sikajang
 Kecamatan : Manyak Payed
 Kabupaten / Kota : Aceh Tamiang
 Provinsi : Aceh
 Sumber Dana : BOS

Formulir BOS-K2
Diisi Oleh Sekolah
Dikirim Ke Tim Manajemen BOS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4	PENERIMAAN	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
4.1	PENERIMAAN TRIWULAN	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.03.02	Jasa Giro Bendahara bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.03.03	Jasa Giro Bendahara bos tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Awal Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
5	BELANJA	80.800.000,00	16.160.000,00	32.320.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	64.640.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07.01	Belanja Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08	Honor Pegawai Tidak Tetap	23.400.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00

5.1.1.08.01	Honor Pegawai Honorer / Tidak Tetap	23.400.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
5.1.1.08.02	Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09.01	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11.02	Honor Pengelola Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.240.000,00	10.310.000,00	10.310.000,00	10.310.000,00	10.310.000,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.427.000,00	1.690.000,00	1.520.000,00	2.015.000,00	1.202.000,00
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.193.000,00	1.268.000,00	1.250.000,00	1.575.000,00	1.100.000,00
5.1.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	384.000,00	72.000,00	120.000,00	90.000,00	102.000,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembe	700.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	220.000,00	0,00	1.810.000,00	220.000,00
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00
5.1.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	405.000,00	220.000,00	0,00	185.000,00	0,00
5.1.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.07	Belanja Bahan/Material Lainnya	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5.1.2.02.08	Belanja Tas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Papan Pengumuman	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
5.1.2.02.10	Belanja Kerikil/Pasir/Tanah Timbun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.11	Belanja Pakan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Bahan Sampel/Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.13	Belanja Material Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.14	Belanja Bahan Praktek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	850.000,00	450.000,00	950.000,00	1.400.000,00
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02	Belanja Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.1.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.1.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Pener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nidar+palip+supri= 300000+5550000=5850000

5.1.2.14.06	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	714.000,00	364.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	714.000,00	364.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Pengadaan Website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	6.230.000,00	2.380.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	600.000,00
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	4.400.000,00	1.150.000,00	900.000,00	1.750.000,00	600.000,00
5.1.2.23.02	Belanja Sosialisasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.23.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.480.000,00	880.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.24.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.24.02	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.26.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer / Tidak T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.26.03	Belanja Honorarium non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.27.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana Bos	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5.1.2.28.01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5.1.2.31	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Ruma	(250.000,00)	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00
5.1.2.31.01	Belanja Pengadaan Gordyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.31.02	Belanja Taplak Meja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.31.03	Belanja Peralatan Dapur	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33	Belanja Pengadaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.01	Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.02	Belanja Alat Penarik / Tali / Seling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.03	Belanja Tabung Gas / Oksigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.04	Belanja Perlengkapan / Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.05	Belanja Bahan dan Peralatan Kerajinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.33.06	Pengadaan gordyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pengurus Barang 150000+ bendahara

5.1.2.34	Belanja Akomodasi	7.650.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00
5.1.2.34.01	Belanja Akomodasi	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
5.1.2.34.02	Belanja Transportasi	7.100.000,00	1.300.000,00	3.050.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00
5.1.2.34.03	Belanja Kontribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	16.160.000,00	0,00	16.160.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.24.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

550000+550000+120000/300000+550000=IV

5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan					
5.2.4.11.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.11.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.11.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.11.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.11.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.160.000,00	0,00	16.160.000,00	0,00	0,00
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -	16.160.000,00	0,00	16.160.000,00	0,00	0,00
5.2.5.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	14.810.000,00	0,00	14.810.000,00	0,00	0,00
5.2.5.01.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
5.2.5.01.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komite Sekolah

Kepala SD Swasta Lembah Jaya

Krueng Sikajang, 2018
Bendahara

SALMAN HUTAGAOL

SAMSUAR, S.Pd
NIP. 19710812199411 1 001

MAWARWATY, S.Pd.I
NIP.

FOTO KEGIATAN WAWANCARA KEPADA MAWARWATY, S.Pd.I KEPALA SD SWASTA LEMBAH JAYA



FOTO WAWANCARA DENGAN KKKS UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V



FOTO LOKASI PENELITIAN SD NEGERI LEMBAH JAYA



LOKASI SD SWASTA LEMBAH JAYA

v



RUANG PUSTAKA SDSWASTA LEMBAH JAYA



FOTO KANTOR SD SWASTA LEMBAH JAYA



FOTO LOKASI SD NEGERI LUNG MANYO



FOTO KELAS I SAMPAI KELAS VI



FOTO PUSTAKA SD NEGERI LUNG MANYO



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SD SWASTA LEMBAH JAYA

